

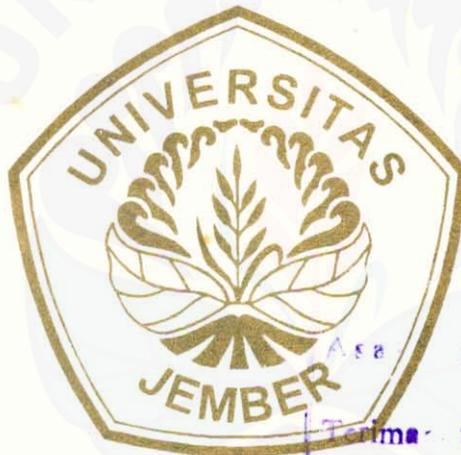
**PENGARUH GERAKAN ANTI AMERIKA SERIKAT DI
INDONESIA
TERHADAP PROSPEK HUBUNGAN
INDONESIA-AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Oleh :

Indah Sri Lestari

NIM. 970910101229

Pembimbing :

Prof. Dr. Achmad Khusyairi

Asa : Studi-h
Pembelian
Tgl. 2-5 NOV 2002
No. Induk : sedm
Klass : 5
327 598 73
LES
p
e.1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

MOTTO



Jadikanlah sabar dan shalat
Sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya
Yang demikian itu sungguh berat
Kecuali
Bagi orang-orang yang khusyu'.
(QS. Al Baqarah :45) *

*) Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1995, hal 16

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Tulis Terbaik dalam Hidupku ini
Kepada :*

*Ayahanda tercinta Bp. H. Moerakip
yang telah memberi motivasi besar padaku untuk
menyelesaikan tugas ini*

*Ibunda tersayang Hj. Sri Sunarmi
Terima kasih atas do'a dan bantuanmu
memperlancar tugasku ini*

serta

*The Best Thing in My Life
Sulistiadi Purnomo, BE
I'll never forget everything you've done to me*

dan tak lupa

*all of my love
Latifah Cahyani Putri
penantian panjang kita telah berakhir*

PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di depan Panitia
Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

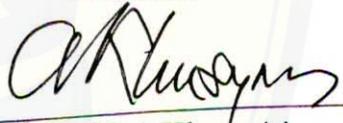
Hari : Senin
Tanggal : 11 November 2002
Jam : 09.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua


Drs. H. Asrial Azis
NIP.130355413

Sekretaris


Prof. Dr. H. A. Khusyairi
NIP. 130261789

Anggota

1. Drs. H. Asrial Azis
2. Prof. Dr. H. A. Khusyairi
3. Drs. H. Nuruddin M. Yasin


(.....)
(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
DEKAN,


Drs. H.M. Toerki
NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rizki dan kesehatan kepada penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang harus ditempuh untuk meraih gelar Sarjana (S1). Penulis sadar, dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan baik yang tampak secara langsung maupun yang tidak, namun semua ini merupakan usaha terbaik yang mampu dilakukan oleh penulis, sehingga skripsi dengan judul **'Pengaruh Gerakan Anti-Amerika Serikat di Indonesia terhadap Prospek Hubungan Indonesia-Amerika Serikat'** dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacakhususnya dalam memperluas pengetahuan mengenai hubungan internasional.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam bentuk material maupun motivasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut yang antara lain :

1. Prof. Dr. H. Achmad Khusyairi selaku pembimbing utama penulis yang telah memberikan kritik, koreksi, tambahan wawasan dan kesabaran dalam membimbing penulis
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember
3. Drs. H. M. Toerki selaku Dekan FISIP Universitas Jember
4. Drs. H. Umaidi Radi, MA, selaku Dosen Wali yang cukup membantu kepada penulis
5. Segenap staf Tata Usaha FISIP Universitas Jember
6. Teman terbaikku, Ayu Puri Andayani, terima kasih atas persahabatan yang manis selama di Jember
7. Teman seperjuanganku Uswatun Hasanah, yang telah menemani selama penelitian ke Jakarta

8. Seluruh teman-teman Hi '97, terima kasih atas semua kenangan manis itu, semoga kita tetap bersahabat
9. Mbak Prapti dan Mas Hafidz, terima kasih atas tumpangnya selama di Jakarta
10. Anak-anak penghuni Jawa II D/7 Jember ; Yunita 'manyun', Srintil, Mbak Tita, Umi, Emilia, I'id, Muda, Winda, Rina 'Kamit', Evi, Betty.
11. Pak Bandi sekeluarga
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan disini satu persatu.

Penulis berharap akan mendapatkan kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini agar menjadi karya tulis yang lebih sempurna dan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada para pembacanya.

Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
1.2.1 Batasan Materi	12
1.2.2 Batasan Waktu	13
1.3 Permasalahan	14
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	16
1.5 Hipotesis	21
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	23
1.6.2 Metode Analisa Data.....	23
1.7 Pendekatan.....	24
BAB II SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT ...	26
2.1 Hubungan Indonesia-AS di masa Kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama.....	26
2.1.1 Masa Kemerdekaan	26
2.1.2 Masa Orde Lama	30
2.2 Hubungan Indonesia-AS di masa Orde Baru	39
2.2.1 Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Johnson...	41
2.2.2 Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Nixon	43
2.2.3 Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Ford	45

2.2.4	Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Carter ..	47
2.2.5	Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Reagan	50
2.2.6	Hubungan EI-AS pada masa Pemerintahan Bush	55
2.2.7	Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan clinton.	58
2.3	Hubungan RI-AS di masa Orde Reformasi.....	65
2.3.1	Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Habibie	66
2.3.2	Hubungan RI-AS pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.....	68
BAB III	SEJARAH KELOMPOK ISLAM DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK DI INDONESIA.....	74
3.1	Organisasi Islam Terbesar di Indonesia.....	74
3.1.1	Muhammadiyah.....	74
3.1.2	Nahdlatul Ulama (NU).....	76
3.1.3	Pesantren	77
3.2	Fundamentalisme Islam dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Islam di Indonesia	78
3.2.1	Konsep Dasar Fundamentalisme Islam.....	78
3.2.2	Pengaruh Gerakan Fundamentalisme Islam terhadap Gerakan Islam di Indonesia.....	80
BAB IV	PENGARUH GERAKAN ANTI-AS TERHADAP PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA-AS	85
4.1	Kebijakan Luar Negeri AS.....	85
4.2	Prospek Hubungan Indonesia-AS	87
4.2.1	Di Bidang Ekonomi.....	88
4.2.2	Di Bidang Kerjasama Militer.....	90
4.2.3	Di Bidang Politik dan Keamanan.....	91
BAB V	KESIMPULAN	93
	DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangan teroris kembali mengguncang dunia pada hari Selasa, 11 September 2001, yaitu serangan yang merobohkan gedung menara kembar World Trade Centre (WTC) di New York, dan menghancurkan sebagian gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) di Pentagon. Serangan ini menggunakan empat buah pesawat komersil milik maskapai penerbangan AS. Dalam peristiwa itu, kurang lebih lima ribu orang tewas yang terdiri atas pelaku ekonomi dan orang-orang lain yang berada di kedua gedung, dan polisi serta pemadam kebakaran yang berusaha menolong korban.

Kerugian fisik dan mental diderita AS akibat serangan ini, terutama karena WTC adalah pusat perdagangan AS dan Pentagon merupakan simbol kekuatan militer AS. Aksi ini juga melumpuhkan aktivitas perdagangan di bursa saham, pasar uang, dan surat berharga lainnya yang selama ini terus memompakan likuiditas ke dalam perekonomian AS dan menyumbang penerimaan AS sebesar kurang lebih US\$ 300 milyar ke perekonomian raksasa yang memiliki PDB sekitar US\$ 10 trilyun pertahun ini. Hal ini menyebabkan The Federal Bank mengalami kerugian yang sangat besar dan sulit dipercaya. Namun yang lebih penting adalah bahwa AS merasa tercoreng muka dan harga

dirinya oleh kaum teroris yang melakukan ini , dan pemerintah AS merasa sangat marah atas terjadinya peristiwa ini.

Segera setelah peristiwa itu terjadi, Presiden AS George W Bush menyampaikan pidatonya di hadapan rakyat AS dimana ia menuding Osama Bin Laden sebagai otak dari serangan teror di hari Selasa dan berjanji akan memburu kemana dan dimana pun Osama berada melalui sebuah perang yang panjang dan tidak kenal menyerah. Ketika Osama menegaskan melalui kantor berita *Pers Islam Afghan* bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali didalam aksi teror tersebut, Bush justeru sedang merancang serangan yang akan ditujukan ke tempat-tempat yang diduga sebagai basis kaum teroris, terutama ke Afghanistan, negara di mana Osama di duga bersembunyi dan dilindungi rezim Taliban. Ia juga menyerukan kepada para sekutunya untuk mendukung tindakannya tersebut melalui Koalisi Milenium Menentang Terorisme dan dengan cara membekukan aset milik Tanzim Al Qaeda, organisasi milik Osama yang dituduh bertanggungjawab atas serangan teroris tersebut.¹

Osama Bin Laden adalah putra seorang kontraktor yang kaya dari Arab Saudi, yaitu Muhammad Bin Awwad Bin Laden. Semenjak masih duduk di bangku kuliah di Universitas King Abdul Aziz Jeddah, ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat terhadap agama dan mencintai sesama muslim. Karena itu ia aktif di organisasi-organisasi yang beraliran Islam

¹ Kompas, 16 September 2001

radikal, untuk membantu perjuangan kaum muslim melawan penindasan oleh bangsa lain. Ketika ia pergi ke Afghanistan, dengan kekayaannya yang besar, Osama mampu membiayai peperangan kaum Mujahidin melawan Uni Sovyet pada 1979, baik itu berupa persenjataan, pembangunan rumah sakit-rumah sakit dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota di Afghanistan untuk memperlancar perjuangan rakyat Afghanistan. Pada masa itu, AS turut memberikan campur tangan dalam membantu perjuangan kaum Mujahidin melawan Uni Sovyet, dikarenakan Uni Sovyet saat itu masih merupakan musuh utama AS di dunia. Bantuan itu berupa berbagai bantuan persenjataan dan perlengkapan perang. Antara Osama dan Amerika Serikat telah terjalin suatu hubungan yang harmonis dan saling mendukung, karena kesamaan tujuan mereka yaitu mengusir Uni Sovyet dari tanah Afghanistan.

Setelah berhasil membantu perjuangan kaum Mujahidin mengusir Uni Sovyet dari tanah Afghanistan, Osama kemudian hijrah ke Sudan dan Yaman, dan melanjutkan usaha ayahnya, diantaranya membangun pabrik farmasi 'Shifa' yang berkembang dengan amat pesat. Ia juga melakukan pembangunan jalanan dan infrastruktur lainnya. Ketika Perang Teluk terjadi, Osama menawarkan kepada pemerintah Arab Saudi untuk melindungi negara itu dari invasi Iraq, tetapi sebaliknya pemerintah Saudi justru menerima pasukan AS di sana, dan mengizinkan mereka untuk mengotori *Al Haramain* (Kota Suci Mekkah dan Medinah) dengan pesta-pesta dan video Madonna. Osama merasa sakit hati dengan tindakan pasukan AS tersebut, apalagi pemerintah Saudi tidak

melarang mereka untuk mendirikan pangkalan militer di Timur Tengah. Osama menyatakan keberatannya terhadap pemerintah Saudi yang menjalankan aturan-aturan dari AS dan bukan aturan-aturan Islam, bahkan Osama kemudian menyatakan akan menggulingkan pemerintahan Saudi jika mereka bersikeras akan tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh AS. Apa yang terjadi kemudian adalah Osama diusir dan dicabut kewarganegaraannya dari Saudi Arabia. Osama kemudian keluar meninggalkan Saudi serta kembali ke Afghanistan. Tindakan AS yang mendukung Israel secara membabi buta tanpa memikirkan nasib rakyat Palestina serta penerapan Standar Ganda-nya di Timur Tengah menambah kebencian Osama terhadap AS. Maka sejak saat itu, Osama menyatakan perang terhadap AS dan berjanji akan mengganggu kepentingan-kepentingan AS di luar negerinya, dan semua orang Amerika menurutnya adalah target yang sah.

Diantara catatan-catatan tindakan teroris Osama Bin Laden ialah peledakan *basement* gedung WTC di New York pada 1993, peledakan kedubes AS di Tanzania dan Somalia pada 1998, dan peledakan kapal induk USS Cole di Yaman tahun 2000. Semua tindakan ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan menyebabkan AS dengan dua lembaga inteligennya yaitu FBI dan CIA sibuk memonitor segala aktifitas jaringan Osama Bin Laden serta memburu kemanapun Osama diduga berada. AS juga telah mengirimkan serangan-serangan ke tempat-tempat persembunyian Osama di Afghanistan, namun Osama selalu saja luput dari sasaran. Ia bersama para pembantu dan

simpatisannya selalu saja berhasil melarikan diri dan mencari persembunyian baru. Tidak heran pula jika kemudian pemerintah AS menghargai siapa saja yang dapat menyeret Osama ke AS dengan hadiah US\$ 5 juta.²

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemerintah AS tidak ragu-ragu lagi untuk menuding Osama sebagai pelaku di balik aksi teror 11 September, mengingat jaringan Osama pernah berusaha merobohkan gedung WTC pada 1993. Pemerintah AS kemudian mengumumkan rencana serangan militernya ke Afghanistan, dalam usaha untuk mendesak pemerintahan Taliban menyerahkan Osama untuk dapat diadili di AS. Rencana tersebut kemudian benar-benar dilaksanakan pada 7 Oktober 2001. AS dengan membentuk Koalisi Milenium Melawan Terorisme yang banyak didukung oleh negara-negara sekutunya termasuk NATO, melancarkan serangan udara ke kota Kabul dan sekitarnya. Serangan itu bukan saja memporak-porandakan tempat-tempat yang diduga sebagai basis persembunyian kaum teroris, tetapi juga menghancurkan wilayah rakyat sipil. Karena itu, kecaman kemudian ditujukan kepada AS oleh kebanyakan negara-negara muslim di Timur Tengah, diantaranya di Pakistan dan Mesir. Mereka menghujat serangan AS terhadap Afghanistan melalui unjuk rasa besar-besaran di pusat kota, sebaliknya menjunjung tinggi Osama sebagai pahlawan kaum muslim yang gagah berani. Namun aksi protes di sana-

² Ahmad Domyathi Bashori (editor), *Osama Bin Laden Melawan Amerika*, Mizan, Bandung, 2000, hal 60

sini itu tetap tidak menggoyahkan niat AS untuk tetap melanjutkan serangan ke Afghanistan sampai Osama Bin Laden menyerah.

Di Indonesia, kecaman datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan, antara lain dari para pengamat politik, Dewan Perwakilan Rakyat, serta umat Islam yang tergabung dalam organisasi-organisasi massa Islam (ormas Islam). Sejumlah 48 ormas Islam melakukan unjukrasa besar-besaran yang terpusat di depan gedung kedutaan besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, diantaranya ialah Forum Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta masih banyak lagi kelompok-kelompok ormas Islam baik yang berasal dari kalangan mahasiswa maupun partai politik. Mereka menghujat tindakan AS terhadap rakyat tak berdosa di Afghanistan. Mereka mengatakan bahwa tindakan AS adalah kejam dan tidak berkeprimanusiaan, AS lah sebenarnya yang menjadi teroris dunia, penjagal dan pemusnah umat muslim.

Ormas-ormas Islam tersebut sampai pada kesepakatan bersama yaitu mengajukan tiga tuntutan yang isinya :

1. Menuntut pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan AS
2. Ancaman melakukan sweeping terhadap warga AS yang berada di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan di beberapa kota lain di Indonesia, antara lain di Solo.

3. Ancaman akan melakukan pemboikotan produk-produk AS di Indonesia. Hal ini sempat dilakukan antara lain pada perusahaan waralaba Mc. Donald, KFC, dan lain-lain.

Aksi demonstrasi ini mendapatkan pengawasan ekstra ketat dari aparat keamanan, bahkan tak jarang aparat bentrok dengan para demonstran, seperti yang terjadi antara aparat dengan FPI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha mengakomodasikan tuntutan-tuntutan kaum muslim, dengan mengeluarkan fatwa kepada pemerintah untuk membekukan hubungan diplomatik dengan AS sampai AS menghentikan serangannya terhadap Afghanistan.³ Hal ini merupakan hasil kesepakatan antara MUI dengan 48 ormas Islam yang aktif melakukan demonstrasi.

Gelombang demonstrasi ini memberikan dampak yang cukup berarti terhadap situasi politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia. Sejumlah perusahaan multinasional meliburkan karyawannya, untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping. Perusahaan Exxon Mobile bersiap-siap akan mengevakuasi fasilitas-fasilitasnya di seluruh Indonesia, sedangkan Caltex segera mengamankan semua asetnya dengan menerjunkan pasukan keamanan swasta asal AS. Sementara itu, sesuai dengan seruan pemerintah AS agar warga AS segera meninggalkan Indonesia, banyak warga AS yang memenuhi bandara-bandara Internasional di Indonesia untuk kembali ke negaranya.

³ Panji, 11 Oktober 2001

Tindakan-tindakan diatas diperkirakan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Duta Besar AS di Indonesia Robert S. Gelbard kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Polri karena Polri dianggap lamban dalam melindungi warga AS di Indonesia. Hal ini sering menimbulkan konflik terbuka antara sang dutabesar dengan para petinggi di Indonesia.⁴

Sementara itu pemerintah Indonesia melalui Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan kembali komitmennya bahwa keamanan seluruh warga asing di Indonesia dijamin sepenuhnya. Disamping itu pemerintah juga menyatakan tidak akan mentolerir aksi sweeping yang telah digembar-gemborkan banyak pihak.

Disamping itu, beberapa hari setelah aksi unjukrasa di Jakarta, seiring dengan serangan AS terhadap Afghanistan yang masih membabi buta, beberapa ormas Islam seperti GPI dan FPI aktif mengkoordinir pendaftaran Jihad ke Afghanistan oleh masyarakat muslim Indonesia. Banyak rakyat muslim di Indonesia merasa wajib membantu saudara seimannya di Afghanistan dan membantu memerangi musuh Allah yaitu dengan cara *Jihad*.⁵ Demi melihat perkembangan keinginan kaum muslim untuk berjihad yang demikian besar, maka pemerintah segera melarang rakyat untuk pergi berjihad. Menurut pemerintah, keinginan untuk membantu rakyat Afghanistan bisa dilakukan melalui lobi-lobi pemerintah Indonesia melalui forum-forum Internasional,

⁴ Panji, 17 Oktober 2001

⁵ Forum Keadilan, 21 Oktober 2001

seperti OKI dan PBB, untuk menekan Amerika agar menghentikan serangannya ke Afghanistan, sebab jalan diplomasi masih jauh lebih baik daripada pergi berjihad ke medan perang Afghanistan yang dapat membahayakan jiwa individu yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia tidak luput dari kecaman masyarakat, karena pemerintahan Megawati dinilai terlalu lambat dalam merespon serangan AS ke Afghanistan, malahan Megawati dinilai tidak akomodatif terhadap aspirasi mayoritas rakyat. Hal ini diungkapkan menyusul kecurigaan banyak pihak bahwa kunjungan Megawati ke AS seminggu setelah tragedi 11 September adalah upaya Megawati untuk menerima *carrot*, dalam politik *stick and carrot* yang dilancarkan AS dalam usaha mencari pembenaran dan dukungan banyak negara dalam melancarkan aksi militernya di Afghanistan. Hal ini terbukti dengan janji kucuran dana bantuan AS kepada Indonesia senilai kurang lebih US\$ 1 miliar yang disampaikan Presiden G.W. Bush langsung terhadap Megawati dalam lawatan Megawati kala itu yang ditentang banyak pihak. Banyak pihak menilai bahwa kunjungan Megawati ke AS ditanggapi serius oleh AS, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dan kunjungan itu dianggap oleh AS sebagai bentuk *dukungan* Indonesia terhadap serangan AS

ke Afghanistan. Akibatnya, Indonesia mendapatkan janji *carrot* atau hadiah US\$ 1 miliar.⁶

Setelah desakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, Megawati akhirnya mengeluarkan pernyataan di depan umat muslim di Masjid Istiqlal Jakarta dalam peringatan Isra' dan Mi'raj bahwa dalam mencari dan memburu seorang teroris, sebuah negara tidak berhak menyerang negara lain. Walaupun serangan itu sudah terlanjur dilakukan, aksi militer tersebut harus dilaksanakan dalam waktu, penggunaan kekuatan, dan sasaran yang terbatas. Hal yang paling ditekankan oleh presiden ialah bahwa serangan tersebut harus berhenti sebelum datangnya bulan Ramadhan tahun 1422 Hijriah, untuk menghormati rakyat Afghanistan yang mayoritas muslim menjalankan ibadah puasa. Pernyataan ini disambut baik oleh banyak pihak dan terbukti dapat meredakan sentimen anti-AS di dalam negeri. Namun sebaliknya, pemerintah AS balik menyudutkan Megawati karena dianggap tidak konsisten dengan ucapannya, dan mereka tetap melanjutkan serangan dengan alasan pertahanan yang terbaik adalah serangan yang kuat.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki bagaimana hubungan pemerintah RI dengan pemerintah AS selanjutnya, dan

⁶ Janji dana bantuan AS terhadap Indonesia senilai US\$ 1 miliar antar lain adalah US\$ 400 juta untuk mendorong investasi dan perdagangan di Indonesia, adanya peningkatan plafon *general system of preference* sebesar US\$ 100 juta, dana hibah atau *grant* sebesar US\$ 130 juta, US\$ 15 juta untuk penanganan pengungsi Ambon dan Aceh, US\$ 2 juta untuk penanganan pengungsi Timor-Timur, dana kerjasama dibidang pelatihan militer sebesar US\$ 40.000 serta bantuan dana untuk memperbarui peralatan TNI sebesar US\$ 400 juta

seberapa jauh peristiwa-peristiwa di atas dapat mempengaruhi hubungan kedua negara. Kemudian penulis menyusunnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul :

'PENGARUH GERAKAN ANTI AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA TERHADAP PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT'

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam menganalisa materi yang terkait seyogyanya diberlakukan suatu pembatasan tertentu. Pembatasan dimaksudkan agar pembahasan tidak mengalami suatu kerancuan yang dapat timbul karena luasnya lingkup pembahasan. Pembatasan ruang lingkup sangat penting dilakukan dalam penulisan karya ilmiah, untuk memperjelas dan mempermudah menganalisa permasalahan dengan lebih saksama, terarah, dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu meluas, mengambang, dan melampaui batas sehingga berakibat berkurangnya bobot ilmiah suatu tulisan.

Definisi ruang lingkup dikemukakan oleh Conzuello G. Sevilla berikut ini :

'Secara singkat ruang lingkup (scope) penyelidikan menetapkan dimana dan kapan penelitian dilaksanakan dan siapa subyeknya. Keterbatasan (limitation) adalah suatu fase atau aspek dari penyelidikan yang mungkin berpengaruh pada hasil studi, tetapi tidak dibawah

kontrol peneliti. Secara jujur, kita harus memuat batasan dalam penelitian.⁷

Berdasarkan pada pengertian diatas, maka pembahasan kali ini meliputi dua aspek, yaitu aspek batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Materi utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai aksi-aksi anti- AS yang dilakukan dalam menentang serangan AS ke Afghanistan, serta kemungkinan pengaruh yang timbul yang diakibatkan oleh aksi-aksi anti-AS tersebut, terhadap hubungan Indonesia dan AS di masa yang akan datang. Tindakan massa yang menggelar unjukrasa di Jakarta sesaat setelah AS melancarkan serangan yang pertama kepada Afghanistan memang cukup meresahkan warga negara AS di Indonesia. Mereka menuntut pemutusan hubungan diplomatik yang hampir terasa mustahil bagi Indonesia untuk melaksanakannya, dikarenakan hubungan baik dengan AS masih diperlukan dalam situasi bangsa dan negara saat ini. Apalagi, dalam segala bidang Indonesia hampir selalu bergantung pada bantuan AS, terutama dari segi ekonomi dan masalah-masalah sosial. Tetapi isu ini akan menjadi sangat penting mengingat seruan ini datang dari umat Islam, elemen masyarakat yang terbesar di Indonesia. Isu ini menjadi bertambah penting manakala umat Islam di Indonesia kemudian tertarik untuk mengirimkan pasukan jihad ke

⁷ Conzuello G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, UI-Press, Jakarta, 1993, hal 18

Afghanistan, sesuatu yang pasti tidak disukai oleh AS. Seruan yang kedua ialah mereka akan mengadakan aksi sweeping terhadap warga AS yang masih berada di Indonesia, dan hal ini sempat dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Tindakan inilah yang memicu tindakan eksodus warga AS keluar dari Indonesia beramai-ramai. Seruan selanjutnya adalah bahwa mereka mengancam akan melakukan boikot terhadap produk-produk AS. Hal ini cukup menguatirkan karena seperti diketahui bahwa di jaman kapitalisme saat ini investasi asing termasuk investasi AS dan negara-negara barat menjadi sangat penting bagi roda perekonomian di Indonesia, yang saat ini belum menunjukkan kestabilan. Pemerintah dalam hal ini harus cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan yang akan mengakomodasikan suara semua pihak, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Sebab, seperti diketahui bahwa hubungan AS dan Indonesia terus mengalami pasang surut semenjak Negara Kesatuan RI pertamakali berdiri. Didalam pembahasan lebih lanjut, masukan informasi dari bidang lain diperlukan untuk lebih mempertajam analisa agar sesuai dengan tujuan penulisan.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang ditetapkan oleh penulis ialah semenjak tanggal 11 September 2001 disaat terjadinya serangan teroris di AS yang kemudian memicu serangan AS ke Afghanistan, serta mendorong gerakan-gerakan anti AS di Indonesia, sampai dengan saat ini dimana kelanjutan serta dampak-dampak gerakan anti-AS masih dirasakan.

1.3 Permasalahan

Merumuskan dan menentukan permasalahan sangat penting dilakukan sebelum meneliti sesuatu hal. Masalah yang jelas merupakan syarat mutlak agar dapat dipilih metode yang tepat, data yang relevan, dan digunakan teori yang sesuai.

Definisi permasalahan diungkapkan M. Nazir berikut ini :

‘Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian, ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (ambiguity), adanya halangan dan rintangan, adanya celah atau gap baik antar kegiatan maupun antar fenomena baik yang telah ada maupun yang akan ada. Penelitian diharapkan akan memecahkan masalah-masalah itu atau sedikit-dikitnya menutup celah yang terjadi.’⁸

Terjadinya demonstrasi di Indonesia menentang agresi AS ke Afghanistan sedikit banyak telah memberikan suatu pekerjaan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Aksi unjukrasa dengan segenap tuntutan yang berasal dari aspirasi umat Islam ditambah dengan rencana banyak kelompok Islam yang akan ikut bertempur dengan cara jihad di medan perang Afghanistan telah terbukti berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat asing kepada Indonesia. Eksodus besar-besaran warga AS dari Indonesia, serta ketakutan adanya reaksi negatif terhadap dunia usaha sangat jelas menjadi alasan bagi pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil tindakan. Apalagi setelah kunjungan Presiden Megawati ke AS sebelum terjadinya gerakan menentang

⁸ M. Nazir, Phd. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakarta 1988, hal 133

AS telah dipersepsikan AS bahwa Indonesia masih mendukung segala tindakan AS secara penuh. Di satu sisi, tuntutan umat Islam tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab bersifat sangat mendesak untuk segera ditangani serta mengancam legitimasi pemerintah, karena umat Islam merupakan segmen terbesar dalam masyarakat Indonesia dan tidak bisa diabaikan.

Seperti diketahui bahwa AS sebagai satu-satunya negara *superpower* saat ini, memiliki kekuatan untuk dapat menjatuhkan perekonomian negara manapun di dunia, termasuk Indonesia. Terlalu berisiko bagi Indonesia untuk menentang arus global yang menganggap terorisme sebagai musuh utama. Disamping itu, untuk keluar dari krisis ekonomi Indonesia membutuhkan bantuan negara-negara barat dan AS, sedangkan kuncinya berada di AS. Seperti diketahui, pasar Indonesia dikuasai AS sebesar 17 persen, terutama untuk pasar tekstil. AS juga merupakan kunci aliran investasi dari luar negeri, karena AS dan negara-negara barat adalah investor terbesar di Indonesia, karena itulah hubungan diplomatik tak mudah untuk diputuskan begitu saja. Lebih daripada itu semua, AS merupakan kunci untuk mengetuk hati dunia agar mau memberikan bantuan pada Indonesia, sebab sebagian besar pinjaman Indonesia berasal dari IMF dan Bank Dunia, dimana di kedua lembaga tersebut saham AS terbesar.⁹

⁹ Forum Keadilan, 21 Oktober 2001

Kehati-hatian pemerintah sangat berkaitan pula dengan keseriusan AS dalam menangkap Osama Bin Laden, tersangka aksi teroris 11 September 2001, serta akan memberikan kesulitan yang cukup berarti kepada pihak-pihak yang dituduh AS mendukung serangan teroris tersebut. Cukup jelaslah bahwa Indonesia tengah berada pada suatu dilema yang amat pelik.

Berdasarkan pada uraian diatas, permasalahan yang penulis coba untuk pecahkan adalah :

‘Sejauh mana gerakan-gerakan anti-AS dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi pemerintah RI dalam mengambil keputusan dalam kerangka hubungan Indonesia-AS’

1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan konsepsi umum untuk memberikan deskripsi dan menganalisa masalah secara terarah, sistematis dan kronologis. Penggunaan teori dalam suatu penelitian ilmiah mutlak diperlukan sebagai dasar bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah. Disamping itu, dengan adanya teori, sudut pandang pembahasan akan terlihat dengan jelas sehingga memudahkan bagi pengamat lain untuk memahami proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Charles A. Mc. Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut :

‘Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta atau merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan atau juga merupakan

seperangkat pernyataan mengenai sesuatu yang diharapkan.'¹⁰

Didalam menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, penulis mempergunakan teori untuk memperjelas pembahasan dan agar sesuai dengan kondisi riil yang terjadi pada obyek penelitian. Teori tersebut adalah sebagai berikut :

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*)

Teori pengambilam keputusan diungkapkan oleh Allison.¹¹ Dia mrngungkapkan bahwa tingkah laku politik suatu negara dapat dianalisis melalui tiga model :

1. *Model Rational Actor.*

Menurut model ini, politik luar negeri digambarkan sebagai hasil keputusan dari aktor rasional. Pemerintah digambarkan sebagai satu kesatuan yang monolit, dimana para pengambil keputusan secara rasional memaksimumkan kepentingan nasional dengan penalaran sungguh-sungguh melalui tahapan-tahapan tertentu. Para aktor akan memilih alternatif yang menguntungkan dan logis demi kepentingan nasionalnya.

2. *Model Organizational Process*

¹⁰ Charles A. Mc Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, terjemahan Mien Joebhar dan Ishak Zahir, Jakarta, 1981, hal 3

¹¹ G.T. Allison, *Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis*, Little Brown dan Company, Boston, 1971, hal 1-9.

Model ini menitikberatkan pada proses dan prosedur bagaimana tindakan tersebut dihasilkan. Menurut model ini, politik luar negeri digambarkan sebagai hasil kerja dari suatu organisasi yang besar. Masing-masing bagian dari organisasi itu sudah mempunyai cara kerja sendiri-sendiri yang baku sesuai dengan kebiasaan yang sudah lama berlaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukan semata-mata hasil proses intelektual tetapi lebih merupakan proses yang sudah dibakukan dan sudah berjalan sejak lama.

3. *Model Bureaucratic Politics*

Pada model ini keputusan tentang politik luar negeri merupakan suatu proses sosial. Artinya politik luar negeri sebagai hasil proses interaksi, penyesuaian diri dari berbagai macam warna politik dari para aktor. Disini terdapat tawar-menawar antara para aktor dalam birokrasi politik nasional. Dengan demikian politik luar negeri merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok politik yang berkepentingan.

Tindakan pemerintah Indonesia adalah sebagai hasil dari proses decision making model bureaucratic politics, dimana keputusan politik luar negeri yang diambil adalah hasil dari kompromi politik antara berbagai macam aktor dalam birokrasi politik yang terlibat. Presiden Megawati sebagai seorang pengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Disatu sisi, ia dituntut untuk menampung, memperhatikan, dan mengakomodasikan suara kelompok-kelompok Islam yang menentang agresi AS ke Afghanistan dan memutuskan pemutusan hubungan diplomatik dengan AS, sedangkan di

sisi lainnya ia harus memperhatikan kepentingan nasional, yaitu bahwa Indonesia masih sangat bergantung dengan AS terutama dibidang ekonomi. Secara tidak langsung kemudian pemerintah mengadakan tawar-menawar dengan berbagai kelompok politik dalam birokrasi nasional, yaitu antara lain dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, serta masyarakat secara umum, dalam memilih alternatif keputusan apa yang paling tepat.

Sesaat sebelum terjadinya agresi militer ke Afghanistan, kelompok-kelompok ormas Islam mengadakan aksi unjuk rasa dalam menentang rencana AS tersebut. Pemerintah dalam hal ini belum memberikan respon yang cukup berarti, dikarenakan serangan belum terjadi dan tuntutan para pengunjuk rasa belum terlalu signifikan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Barulah ketika serangan AS ke Afghanistan benar-benar terjadi serta memicu gelombang aksi unjukrasa yang demikian besar, pemerintah barulah berpikir untuk mengadakan bargaining dengan para pengunjuk rasa. Pada saat itu, pemerintah melalui para birokratnya seperti Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan AS tidak mungkin dilakukan begitu saja, karena terdapat hal-hal penting yang musti diperhatikan oleh bangsa Indonesia dan tidak dapat dihindari, seperti faktor ketergantungan ekonomi yang besar terhadap AS.

Proses bargaining juga tampak dalam pernyataan pemerintah dalam menanggapi serangan AS ke Afghanistan. Pada mulanya, pemerintah

menyatakan mendukung tindakan AS dalam memerangi terorisme, hal ini disampaikan presiden pada saat lawatan Megawati ke AS seminggu setelah terjadinya aksi terorisme di AS. Kunjungan Megawati yang sebenarnya jauh-jauh hari telah direncanakan untuk membicarakan kemungkinan bantuan dana AS bagi perekonomian di Indonesia dan menghadapi penentangan dari banyak pihak yang menganggap bahwa kunjungan tersebut belum tepat dilakukan pada saat situasi domestik AS pasca serangan teroris, pada akhirnya tidak mampu menghindari isu terorisme dan memaksa pihak Indonesia untuk menyatakan keprihatinan rakyat Indonesia terhadap aksi terorisme tersebut, sekaligus memberikan dukungan moral terhadap tindakan menentang terorisme yang sedang digalang oleh AS. Kunjungan ini terbukti menghasilkan janji kucuran dana sebesar US\$ 1 miliar yang kelak belum tentu dipenuhi oleh AS karena perubahan pandangan politik Indonesia terhadap AS. Tetapi, manakala aksi unjukrasa meledak dan pemerintah dianggap tidak mengakomodasikan suara umat Islam, terdapat proses bargaining antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait yang pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan penting, yaitu dari pernyataan yang dinilai terlalu 'lunak', kepada pernyataan yang tegas, yaitu pemerintah menganggap bahwa dalam menangkap dan mencari seorang teroris, tidak berarti sebuah negara boleh menyerang negara lain. Pernyataan yang disampaikan pada peringatan Isra' dan Mi'raj di Masjid Istiqlal Jakarta ini terbukti mampu meredam reaksi massa dan menganggap pernyataan itu sudah tepat.

1.5 Hipotesis

Permasalahan yang telah diungkapkan memerlukan jawaban sementara atau hipotesis. Hipotesis diperlukan agar analisa lebih terfokus dalam mencari pembuktian suatu dugaan.

Pengertian hipotesis diungkapkan oleh Conzuello, dkk :

‘Hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian’¹²

Serangan AS ke Afghanistan mendapatkan reaksi yang cukup keras di Indonesia. Reaksi itu datang dari berbagai kalangan termasuk kelompok-kelompok Islam yang menggelar aksi unjuk rasa menentang serangan tersebut, dan menuntut pada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, ancaman dilakukannya sweeping terhadap warga AS, serta ancaman pemboikotan produk-produk AS.

Pemerintah Megawati telah berusaha keras untuk mengakomodasikan suara masyarakat Islam sebagai komponen terbesar di Indonesia, dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang bersifat akomodatif, namun juga tidak melupakan posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap AS.

Pada akhirnya pemerintah AS sendiri dapat mengerti atas kondisi di Indonesia bahwa Islam merupakan kelompok sosial yang terbesar, sehingga

¹² Conzuello, dkk. op cit. hal 13

1.5 Hipotesis

Permasalahan yang telah diungkapkan memerlukan jawaban sementara atau hipotesis. Hipotesis diperlukan agar analisa lebih terfokus dalam mencari pembuktian suatu dugaan.

Pengertian hipotesis diungkapkan oleh Conzuello, dkk :

'Hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel didalam masalah penelitian'¹²

Serangan AS ke Afghanistan mendapatkan reaksi yang cukup keras di Indonesia. Reaksi itu datang dari berbagai kalangan termasuk kelompok-kelompok Islam yang menggelar aksi unjuk rasa menentang serangan tersebut, dan menuntut pada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, ancaman dilakukannya sweeping terhadap warga AS, serta ancaman pemboikotan produk-produk AS.

Pemerintah Megawati telah berusaha keras untuk mengakomodasikan suara masyarakat Islam sebagai komponen terbesar di Indonesia, dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang bersifat akomodatif, namun juga tidak melupakan posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap AS.

Pada akhirnya pemerintah AS sendiri dapat mengerti atas kondisi di Indonesia bahwa Islam merupakan kelompok sosial yang terbesar, sehingga

¹² Conzuello, dkk. op cit. hal 13

pemerintah Indonesia tidak dapat mengabaikan kelompok yang amat sensitif terhadap kebijakan luar negeri terutama yang menyangkut tentang Islam, dan AS harus dapat mengerti pula bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan banyak permasalahan ekonomi yang berat dan sangat tergantung pada AS dalam usahanya untuk keluar dari permasalahan yang ada.

Dengan demikian hipotesis yang kami rumuskan yaitu bahwa pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh gerakan anti-AS di Indonesia tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap hubungan kedua negara.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, metode merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi pencapaian tujuan penulisan. Metode dipakai dalam hal pengumpulan data, menganalisa permasalahan, memudahkan perumusan dan mencari kebenaran suatu pernyataan.

Metode penelitian menurut The Liang Gie :

'Metode adalah cara atau langkah yang berulang-ulang kembali, sehingga terjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada awalnya hal ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut'¹³

¹³ The Liang Gie, *Ilmu Politik, Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologis*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1987, hal 103.

Metode Penelitian didalam menganalisa permasalahan terdiri atas dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk mempertajam analisa, maka dilakukan dengan cara studi pustaka atau *Library Research*, yaitu riset kepustakaan dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku ilmiah saja, tapi juga dari artikel yang ada di media cetak dan elektronik yang ada.

Lembaga-lembaga yang menjadi sumber pengumpulan data adalah :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Perpustakaan CSIS Jakarta
4. Perpustakaan LIPI Jakarta
5. Perpustakaan STAIN Malang

1.6.2 Metode Analisa Data

Di dalam metode analisa data, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan dari segi kualitas, dikarenakan analisa secara kuantitatif belum dapat diterapkan dengan baik. Metode kualitatif akan mendeskripsikan serta menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang dapat mengantarkannya kepada suatu keimpulan yang akan diambil berdasarkan kepada fenomena-fenomena tersebut.

Generalisasi atau penalaran yang dipakai oleh penulis adalah generalisasi deduktif yang dipadukan dengan generalisasi induktif. Generalisasi deduktif

diterapkan pada penyusunan hipotesis, dimana hipotesis ini akan menjadi dugaan awal bagi peneliti untuk mengamati fenomena yang terjadi berdasarkan permasalahan yang ada. Metode deduktif memungkinkan peneliti dapat bekerja dengan urut, dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam usaha mendeskripsikan dan membuktikan hipotesis dengan fakta-fakta yang ada, metode yang dipakai selanjutnya ialah penalaran induktif, yaitu penalaran yang berusaha membuktikan apakah perumusan hipotesa tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, metode penalaran induktif berusaha menyimpulkan jawaban atas permasalahan, sesuai dengan kondisi atau fakta-fakta yang ada, serta untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar dan sesuai dengan kenyataan, atautkah tidak.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan untuk mempertajam analisa yang membuat penelitian menjadi lebih spesifik sifatnya. Pendekatan juga memungkinkan pembahasan dari segi yang terbatas, sehingga pembahasan lebih mudah dipahami karena mengarah pada satu titik tertentu.

Menurut The Liang Gie pendekatan adalah :

'segenap rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu

sama lain, dan peranannya dalam keseluruhannya yang bulat',¹⁴

Didalam analisa masalah, penulis melakukan pendekatan sejarah politik. Didalam menganalisa pengaruh-pengaruh yang timbul akibat adanya aksi gerakan anti-AS, dan untuk menganalisa hubungan Indonesia-AS, penulis mempergunakan pendekatan sejarah politik dikarenakan hubungan Indonesia-AS sudah berlangsung semenjak awal kemerdekaan dan mengalami pasang-surut. Dengan mempergunakan pendekatan sejarah politik, kita akan mengetahui sejauh mana perkembangan hubungan kedua negara di masa lalu guna memprediksikan kondisi hubungan tersebut di masa yang akan datang. Disamping itu, pendekatan sejarah politik dapat dimanfaatkan untuk menganalisa gejala yang berulang secara kontinyu di dalam hubungan kedua negara yang telah dijalin selama bertahun-tahun lamanya.

¹⁴ The Liang Gie, op. cit. Hal 93



·BAB II

SEJARAH HUBUNGAN

INDONESIA-AMERIKA SERIKAT

2.1 Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dari masa Kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada masa kemerdekaan dan pada masa orde lama telah menjadi perhatian yang serius karena pada masa inilah telah diletakkan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia yang akan menjiwai pelaksanaan politik Indonesia di waktu-waktu yang akan datang.

2.1.1 Masa Kemerdekaan

Hubungan Indonesia-AS pertama kali mendapatkan bentuknya yaitu pada saat Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan Internasional mengenai berdirinya suatu negara dan pemerintahan Indonesia yang berdaulat secara penuh. Pada saat itu, Indonesia, yang telah menganggap bahwa AS adalah salah satu negara adidaya yang mempunyai pengaruh besar di dunia, telah berusaha mencari suatu dukungan dari AS. Hal ini terutama karena hasil perundingan-perundingan dengan Belanda dan pihak Sekutu tidak menguntungkan Indonesia, yang disebabkan karena Belanda selalu mengingkari hasil perundingan tersebut. Apalagi, Belanda bersikeras agar Indonesia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda dengan suatu bentuk Negara Indonesia Serikat.

Kemudian pada Perjanjian Linggarjati, yang diratifikasi pada 25 Maret 1947 oleh kedua delegasi Indonesia dan Belanda, Indonesia mendapatkan pengakuan '*de facto*' dari Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta wilayah-wilayah lain yang akan dimasukkan secara bertahap kepada wilayah republik Indonesia karena masih diduduki oleh Belanda dan atau tentara Sekutu. Pada saat inilah, Amerika Serikat, bersama dengan Inggris, Australia dan Cina telah pula memberikan pengakuan '*de facto*' kepada Indonesia sehingga dengan demikian meningkatkan derajat pengakuan dunia Internasional terhadap berdirinya suatu negara Indonesia.¹⁵

Hubungan baik dengan AS masih terus berlanjut, terutama pada saat AS tergabung dalam Komisi Jasa-Jasa Baik atau lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari AS, Australia, dan Belgia. Komisi ini terus membantu penyelesaian masalah antara Indonesia dengan Belanda antara lain yaitu melalui perjanjian *Renville* yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal milik Angkatan Laut AS bernama *Renville* yang tengah berlabuh di lepas pantai di Jakarta.

Perwakilan delegasi AS, Dr. Frank Graham, secara implisit mendorong kepemimpinan nasionalis untuk mengadakan kesepakatan dengan Belanda, agar terhindar dari cara-cara kekerasan. Hal ini tidak terlepas pula dari usaha AS agar Indonesia dan Belanda mematuhi isi perjanjian *Renville*.

¹⁵ Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986, hal 19-22

Sementara itu, di pihak Indonesia, harapan-harapan yang disampaikan AS merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, mengingat AS telah memegang kunci keberhasilan diplomasi Indonesia dalam persetujuan ini. Lebih daripada itu, Indonesia tidak mempunyai pilihan alternatif lain, walaupun pada akhirnya suatu kesepakatan final telah dicapai, yaitu kedaulatan seluruh Hindia Belanda akan berada pada pihak Belanda hingga Pembentukan Indonesia Serikat yang akan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka.

Pada Februari 1948, disaat Drs. M Hatta telah menggantikan kedudukan PM Amir Sjariffudin, mantan PM Sjahrir telah mencetuskan suatu sikap ketidakberpihakan (non blok) Indonesia terhadap kekuatan timur (Uni Sovyet) maupun kekuatan barat (Amerika Serikat). Argumentasi awal Sjahrir ialah bahwa ia menolak keberpihakan dalam bentuk apapun kepada Uni Sovyet yang dukungannya kepada Indonesia bersifat kontras dengan sifat mendua yang diperlihatkan AS. Hal ini berkaitan secara erat dengan penolakan Hatta untuk mengesahkan suatu perjanjian konsuler dengan Moskow yang memicu tantangan dalam negeri kepada pemerintah, yaitu tuntutan yang berasal dari golongan sayap kiri yang menuntut penataan kembali atas isi Perjanjian Renville. Hatta tetap pada komitmennya di depan Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk merumuskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat Non Blok. Konsep ini kemudian dinilai sebagai suatu kepura-puraan belaka, karena harapan dari Hatta dan kawan-kawannya agar terus mendapatkan dukungan dari Amerika untuk tujuan-tujuan politik mereka.

Kemudian kemampuan Hatta untuk meredam aksi pemberontakan PKI di Madiun 1948, telah mendapatkan simpati dari Washington, sebab dalam iklim yang menyelimuti perang dingin, dijamin bahwa menghancurkan pemberontakan komunis akan dinilai dengan penuh persetujuan. Atas kepiawaian Hatta dalam berdiplomasi kepada Amerika pulalah, maka Amerika memandang bahwa masalah Indonesia semakin urgen dalam konteks Perang Dingin. Atas dasar tersebut, Amerika tidak menyetujui upaya Belanda dalam menangani masalah dengan Indonesia dengan menggunakan cara-cara militer. Akibat yang lebih jauh ialah dengan adanya ancaman pembatalan kredit Marshall Plan kepada Belanda yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluarannya di Hindia Belanda. Namun karena ketakutan bahwa pembatalan ini akan berakibat buruk terhadap proses Program Pemulihan Kembali Eropa, maka Belanda terpaksa menerima usulan penyelesaian oleh Departemen Luar Negeri Amerika, yaitu untuk memulihkan kepemimpinan moderat Indonesia yang diidentifikasi dengan kebijakan diplomasi.¹⁶

Pada akhirnya, pihak Indonesia setuju untuk menyerahkan kedaulatannya secara penuh kepada Indonesia. Hal ini tidak dipandang semata-mata karena bantuan AS saja, namun juga sebagai suatu bentuk keberhasilan diplomasi pemerintah Indonesia yang baru menemukan bentuk konkritnya

¹⁶ Ibid, hal 34

dalam usaha memperoleh kedaulatan secara penuh dari dunia Internasional pada umumnya, dan dari Kerajaan Belanda pada khususnya.

2.1.2 Masa Orde Lama

Pada permulaan Negara Indonesia yang masih baru, suatu konsep politik luar negeri yang bersifat ketidakberpihakan terhadap kekuatan-kekuatan besar di dunia tumbuh dengan kuat. Hal ini terutama merupakan prinsip yang dipegang oleh Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden, dan yang telah mendasari penolakan Hatta terhadap tekanan AS untuk masuk ke dalam kebijakan pengurangan sejabatnya, dalam konteks perang dingin yang sedang berkecamuk. Namun suatu pengingkaran serius telah dilakukan Hatta dimana ia secara rahasia telah mengajukan permintaan pada AS untuk menyediakan perlengkapan militer bagi polisi, sekaligus bersedia mematuhi embargo ekspor perlengkapan-perengkapan strategis terhadap setiap musuh AS di dunia.

Konsep ketidakberpihakan kemudian dimanifestasikan oleh Hatta dalam suatu konsep yang lebih komprehensif yang disebut sebagai *Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif*. Konsep ini kemudian masih terus dipakai dalam periode-periode kepemimpinan di Indonesia selanjutnya, namun keefektifan pelaksanaannya dipertanyakan lagi setelah Perang Dingin usai.

Dimasa kepemimpinan Perdana Menteri Sukiman tahun 1951, Indonesia menerima bantuan dari Amerika Serikat, yaitu berupa bantuan militer dan ekonomi yang diberikan AS kepada Indonesia hanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Keamanan Bersama

(Mutual Security Act) tahun 1951. Undang-Undang ini mengharuskan setiap negara penerima bantuan militer untuk menyumbangkan sepenuhnya pada 'pengembangan dan pemeliharaan kekuatan sendiri dan kekuatan dunia bebas'. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsi politik luar negeri Indonesia yang telah ditetapkan. Karena itulah kabinet Sukiman yang sudah terlanjur menandatangani persetujuan bantuan tersebut akhirnya jatuh karena tuntutan masyarakat yang mengedepankan peningnya bebas dari pengaruh pihak-pihak yang saling bermusuhan dalam perang dingin.

Hubungan dngan AS sempat menegang yaitu pada saat AS memprakarsai pertemuan di Manila untuk merundingkan Pesetujuan Pertahanan Asia Tenggara. Seperti halnya India, Indonesia melalui PM Ali Sastroamidjojo merasa marah atas prakasa tersebut karena pertemuan itu dianggap sebagai suatu pemberlakuan perang dingin yang tak berdasar ke dalam Asia Tenggara. Hubungan tidak harmonis ini diperkuat lagi dengan kecenderungan politik luar negeri Indonesia yang bergerak untuk menciptakan suatu 'blok' sendiri yang beranggotakan negara-negara di Asia dan Afrika. Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955 adalah momentum pertama dimana Indonesia bersama negara-negara tersebut berikrar untuk bersikap tidak memihak kepada salah satu pun kekuatan-kekuatan di dunia yang tengah bertikai dalam Perang Dingin. Namun, pada bulan Maret 1956 AS memberikan bantuan pangan sejumlah 56 juta dolar AS yang diikuti oleh

kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles ke Jakarta dan mengundang Presiden Soekarno untuk datang ke AS.

Pemberontakan-pemberontakan daerah yang muncul pada tahun 1958 antara lain PRRI/ Permesta mendorong pemerintah untuk mengadakan pembelian senjata kepada AS. Namun permohonan ini ditolak oleh AS sehingga Indonesia mengalihkan misi pembelian senjata ke Eropa Timur. Hal ini menyebabkan keprihatinan AS akan kuatnya pengaruh komunis di Indonesia dan secara tidak langsung akan memberikan dukungan terhadap pemberontakan-pemberontakan itu sendiri. Dukungan AS terhadap pemberontakan di daerah kemudian memperkuat aksi dan gerakan anti barat di Jakarta. Mereka berpendapat bahwa AS berupaya untuk mengganggu keutuhan wilayah Republik. Namun hubungan tidak harmonis ini kemudian membaik karena AS menyadari kekeliruannya sehingga ia kemudian berusaha memperbaikinya dengan memberikan lisensi ekspor senjata ke Indonesia serta memberikan bantuan pangan.¹⁷

Periode Demokrasi Terpimpin dimulai pada 1960 ketika Indonesia kembali dari bentuk pemerintahan parlementer ke bentuk pemerintahan demokrasi terpimpin atau presidensiil. Pada periode ini politik luar negeri Indonesia ditandai dengan kecenderungan penonjolan diri Presiden Soekarno yang mengedepankan peranan pribadi Soekarno dalam mencapai tujuan

¹⁷ Ibid, hal 74-75

nasional. Pada intinya Soekarno menginginkan agar Indonesia mendapat pengakuan Internasional khususnya dari negara-negara Barat, karena sebagai negara dengan kekayaan yang luar biasa, menurutnya Indonesia pantas mendapatkan hal ini. Diantara poin-poin penting yang dikumandangkan Soekarno antara lain yaitu kekecewaan Indonesia perihal Irian Barat yang belum kembali ke pangkuan Indonesia yang menurut Soekarno disebabkan oleh imperialisme dan kolonialisme Barat. Istilah Soekarno yang populer yaitu '*Nekolim*' (Neokolonialisme, Kolonialisme, Imperialisme).

Dengan gaya politik Soekarno yang menonjol tersebut ternyata Soekarno kurang disenangi oleh negara-negara Barat. Dunia Barat tidak siap menerima soekarno beserta segenap tuntutanannya. Ia dinilai sebagai pribadi yang congkak dan berlebih-lebihan terutama dalam menangani masalah ekonomi dalam negerinya. Sebaliknya, ia cukup bisa diterima di Uni Sovyet dan Cina bahkan ia menerima puji-pujian dan sambutan yang meriah ketika berkunjung ke kedua negara tersebut.¹⁸

Dalam pandangan Soekarno, negara-negara di dunia bukan terbagi antara negara-negara yang tergabung dalam blok barat dan blok timur, maupun negara-negara di luar itu, akan tetapi negara-negara di dunia terbagi kedalam kekuatan baru yang sedang bangkit atau *New Emerging Forces (NEFOS)* disatu sisi, serta kekuatan-kekuatan lama yang telah mapan atau *Old Establish*

¹⁸ Ibid, hal 82-83

Forces (OLDEFOS). NEFOS terdiri dari bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, dan kelompok-kelompok progresif didalam negara-negara kapitalis. Sedangkan OLDEFOS terdiri dari negara-negara di blok Barat dan blok Timur yang lebih dahulu eksis. Soekarno berusaha menyerukan kepada dunia, tuntutan-tuntutan NEFOS yang sedang digalangnya terutama perihal tuntutan 'membangun dunia baru ' serta mengkritik tajam struktur sistem Internasional yaitu adanya imperialisme dan kolonialisme yang menjadi akar dari seluruh permasalahan di dunia. Pandangan Soekarno ini diuraikan pertama kali didalam pembukaan konferensi pertama negara-negara NonBlok di Beograd, Yugoslavia, September 1961.

Soekarno menjalankan suatu metoda *diplomasi paksaan* untuk merebut Irian Barat kembali ke Indonesia. Diplomasi Paksaan dimaksudkan untuk menimbulkan krisis Internasional dimana hal ini akan menarik Amerika Serikat dan Uni Sovyet terlibat didalamnya. Setelah berhasil menarik bantuan dana dan peralatan militer dari Uni Sovyet untuk menekan Belanda, Soekarno kemudian berusaha menarik perhatian AS agar terlibat memberi bantuan pada Indonesia. Soekarno beranggapan bahwa AS tidak ingin Indonesia masuk ke dalam blok komunis, sehingga Soekarno yakin AS akan turut memberi bantuan militer yang lebih besar. Namun pemerintahan Presiden Eisenhower pada saat itu merasa tidak dapat menerima strategi seperti itu, hal ini terutama dipengaruhi oleh perasaan Eisenhower secara pribadi yang tidak menyukai Soekarno. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah AS menolak memberikan

bantuan kepada Indonesia. Namun ketika Eisenhower digantikan oleh John F. Kennedy pada tahun 1961, pemerintah AS menjadi lebih kooperatif. Hal ini ditunjukkan Kennedy kepada Soekarno ketika Soekarno berkunjung ke AS dan diterima dengan baik. Kennedy berjanji akan mengirimkan tim peneliti ke Indonesia untuk meneliti sejauh mana kesiapan Indonesia untuk menerima bantuan AS demi rencana perekonomian delapan tahun Indonesia. Disamping itu, AS juga tidak memberi kontribusi apapun terhadap usaha Belanda atas Irian Barat, sehingga hal ini cukup memberikan dukungan bagi Indonesia.¹⁹

Namun karena hal itu tidak juga membuat Belanda mau melepaskan Irian Barat, maka Soekarno terus menguatkan suasana krisis dengan sinyal adanya ancaman peperangan. Oleh karena itu AS kemudian terpaksa turun tangan. Presiden Kennedy menyerukan agar Indonesia dan Belanda tidak menggunakan cara-cara kekerasan tetapi dengan menggunakan cara perundingan untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Maka pada Maret 1962, dengan AS sebagai mediator, pembicaraan dimulai di luar kota Washington. Indonesia berusaha meyakinkan AS bahwa jika AS berupaya membantu memisahkan Irian Barat dari kontrol Belanda, maka hal itu akan menguntungkan AS sendiri. Namun jika tidak, maka hal itu akan berlaku sebaliknya.

¹⁹ Ibid, hal 94

Perundingan itu berlangsung lama dan alot, dengan diwarnai oleh usaha oleh pihak Indonesia untuk terus meningkatkan suasana krisis di Papua. Kemudian persetujuan akhir dicapai pada 15 Agustus 1962 yaitu penyerahan administrasi mula-mula kepada pejabat PBB dan kemudian penyerahan akhir kepada Indonesia setelah tanggal 1 Mei 1963. PBB juga berjanji akan membantu Indonesia didalam proses penyerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Soekarno dengan gegap gempita menerima kemenangan ini, karena sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada rakyat Indonesia dalam setiap pidatonya. Sekali lagi, seperti halnya dalam masa kemerdekaan, AS telah menjadi mediator yang penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuannya. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian Soekarno memainkan diplomasi paksaan, dengan menggunakan alih senjata dari Uni Sovyet kepada Indonesia untuk mempengaruhi pemerintah AS agar menggunakan pengaruh politiknya terhadap pemerintah negeri Belanda agar Belanda menyerahkan Irian Barat pada Indonesia.²⁰

Kegemaran Soekarno akan romantika revolusioner masih terus dilanjutkan dengan membangun konfrontasi terhadap pembentukan federasi Malaysia. Menurut Soekarno, Malaysia merupakan negara yang dirancang oleh kaum Imperialis dan Kolonialis, yang mengancam keberadaan Indonesia sebagai tetangga terdekat, terutama yang berada di Kalimantan bagian utara. Pada masa

²⁰ Ibid, hal 99

ini, AS mengurangi keterlibatannya terhadap Indonesia. Hal ini disebabkan yang pertama yaitu AS tidak menaruh simpati terhadap sikap revolusioner Soekarno. Disamping itu karena dalam menjalankan politiknya, Soekarno selalu didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), hal yang pasti sangat tidak disukai AS. AS sempat pula menghentikan bantuan ekonomi dan militernya. Namun setelah melalui pertimbangan kembali yang cukup mendalam, Washington akhirnya tetap melanjutkan bantuan ekonomi sebesar diatas 70 juta dolar AS setiap tahunnya, serta mengoperasikan perusahaan minyak di Indonesia. Pemerintah AS juga ingin mempertahankan saluran komunikasi dengan Angkatan Bersenjata Indonesia, karena dianggap sebagai benteng anti komunis utama di dalam suatu negara yang sangat penting di Asia Tenggara.

Kevakuman campur tangan AS tersebut ternyata tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan AS merasa khawatir terhadap situasi militer di Kalimantan Utara, dan kemungkinan Malaysia meminta bantuan Australia dan Selandia Baru, yang akan mempengaruhi tuntutan kewajiban AS didalam keanggotaan pakta ANZUS-nya. Presiden Lyndon Johnson, pengganti John F. Kennedy yang telah terbunuh, kemudian mengirim Jaksa Agung Robert Kennedy, yaitu adik John F. Kennedy, untuk bertemu dengan Soekarno di Tokyo, Jepang pada Januari 1964. Pertemuan yang penuh keakraban tersebut akhirnya berhasil membuat Soekarno mengadakan gencatan senjata di

sepanjang perbatasan Kalimantan, namun belum sanggup memadamkan gejala semangat konfrontasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia dipaksa Malaysia dalam pertemuan di Bangkok untuk menarik satuan gerilya di Kalimantan Utara, namun Indonesia tidak bersedia melakukannya. Suhu politik yang ada kemudian semakin merugikan Indonesia, karena Koalisi Pemerintah di Malaysia semakin menguat. Disamping itu pertemuan antara Soekarno dan Jaksa Agung Kennedy ternyata tidak menimbulkan intervensi diplomatik AS terhadap kepentingan Indonesia seperti pada saat AS campurtangan dalam masalah Irian Barat. Soekarno merasa marah dan kecewa dengan keadaan ini dan berkata *'go to hell with your aid'* (persetan dengan bantuanmu) dihadapan Dubes AS untuk Indonesia, Howard Jones. Setelah kejadian ini, AS bahkan cnggan menaruh perhatian terhadap kelanjutan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Padahal, Soekarno semakin gigih menekan AS dan sekutu-sekutunya didalam setiap pidatonya, antara lain ia mengecam agresi AS ke Vietnam Utara, dan menyatakan bahwa Cina merupakan mitra yang baik dan sesuai bagi Indonesia. Bahkan Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Malaysia masuk menjadi anggota PBB.

Pada akhirnya konfrontasi terhadap Malaysia telah dianggap sebagai suatu kegagalan yang menyakitkan, mengingat kontrasnya kegagalan itu dengan keberhasilan merebut Irian Barat.

Kegagalan Soekarno diperparah dengan adanya aksi Gerakan 30 September 1965 di dalam negeri, yaitu aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira TNI. Para pelaku penculikan ini kemudian diidentifikasi sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu partai penyokong Soekarno yang utama disamping PNI. Kedudukan Soekarno menjadi lemah setelah ini. Jenderal Soeharto, seorang perwira Panglima Kostrad TNI, memimpin Angkatan Darat untuk mematahkan pemberontakan tersebut dalam dua hari. Berbulan-bulan kemudian, yaitu Maret 1966 dengan melalui suatu proses yang panjang akhirnya Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan Menteri Luar Negeri Subandrio ditahan.²¹

2.2 Hubungan Indonesia- Amerika Serikat di masa Orde Baru

Periode Orde Baru dalam perpolitikan Indonesia dimulai dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto yang telah menggantikan Soekarno sebagai presiden. Pada masa ini Soeharto mulai melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam tatanan bangsa dan negara Indonesia, antara lain yang terpenting adalah perubahan didalam arah kebijakan politik luarnegeri Indonesia . Soeharto memutuskan untuk kembali kepada Kebijakan Politik

²¹ Sebagai seorang perwira yang sedang naik daun , cukup mengherankan mengapa Mayjen Soeharto tidak termasuk ke dalam perwira-perwira TNI yang diculik dan dibunuh dalam malam peristiwa G30S/PKI . Apalagi kemudian Mayjen Soeharto memimpin misi mematahkan kudeta dalam dua hari. Banyak kalangan kemudian menafsirkan bahwa AS (CIA) turut campurtangan dalam masalah ini, sebagai akibat dari perlawanan Soekarno terhadap AS. Masalah ini dan proses penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto yang dikenal dengan *Supersamar* masih menjadi polemik hingga saat ini karena kurangnya bukti-bukti dan saksi.

luar negeri Bebas dan Aktif, dengan ditandai kembali aktifnya Indonesia di PBB dan semakin aktifnya Indonesia didalan Organisasi Gerakan Non Blok (GNB). Dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia juga bertekad pula untuk meninggalkan gaya politik yang meledak-ledak, penuh gejolak, dan retorika seperti pada masa Orde Lama. Soeharto juga berusaha menata perekonomian Indonesia yang carut-marut. Ia memahami bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat itu ialah sebuah pertolongan dari luar negeri, yaitu dari negara-negara industri maju yang mampu menolong Indonesia keluar dari kondisi perekonomian yang parah. Oleh sebab itu maka Soeharto berusaha mengembalikan hubungan baik dengan AS dan Jepang, karena ia yakin kedua negara inilah yang paling mungkin sanggup memberikan bantuan yang dibutuhkan. Hal ini kemudian terbukti dengan berhasil dibentuknya IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia). IGGI dibentuk atas dasar kepercayaan yang dilembagakan dengan sumber dana terbesar yaitu dari AS dan Jepang. Bagi AS yang tengah menghadapi Perang Vietnam, motif-motif politik terhadap IGGI bukannya tidak ada, melainkan bahwa AS menganggap bahwa perubahan politik di Indonesia telah memungkinkan munculnya pengimbang stabilitas baru di Asia Tenggara.²²

Sebelum terbentuknya IGGI AS telah terlebih dahulu memberikan bantuan terhadap rehabilitasi ekonomi di Indonesia yang tengah berada dalam kondisi yang

²² M. Leifer, hal 169

amat parah, yaitu berupa '*food for work*' di Jawa Tengah dan penundaan hutang – hutang luar negeri yang dipelopori AS melalui peremuan-pertemuan di Paris dan Tokyo. Bantuan ini diberikan karena inflasi telah mencapai 660 % pada 1966.

Pada tahun 1967 IGGI memberikan bantuan dana sebesar 200 juta dolar AS dengan AS dan Jepang yang menanggung sebagian besar dana tersebut masing-masing sebesar sepertiganya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 360 juta dolar AS pada 1968 dan meningkat lagi sebesar 500 juta dolar AS pada 1969. Kesepakatan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia juga dicapai, termasuk persyaratan pembayaran sebanyak 30 kali selama 30 tahun.

Oleh karena itulah, hubungan Indonesia-AS pada masa ini telah memasuki tahap yang penting, yang sarat dengan 'persahabatan' kedua negara dan berkaitan erat dengan usaha-usaha Indonesia untuk memperbaiki kondisi negara terutama dibidang ekonomi yang sangat membutuhkan bantuan AS.

Berikut ini akan diuraikan hubungan kedua negara berdasarkan periode kepemimpinan nasional Amerika Serikat.

2.2.1 Hubungan AS-Indonesia Pada masa Pemerintahan Presiden Lyndon Johnson (1965-1968)

Situasi politik Indonesia pada masa ini masih bersifat transisi dimana masih bersifat transisi dimana masih terdapat sisa-sisa permasalahan dari masa kepemimpinan Soekarno antara lain yaitu pengaruh peristiwa G 30 S/PKI yang masih besar. Di pihak AS, tuduhan bahwa peristiwa 30 September didalangi oleh CIA (Central Inteligent Agency) membuat Administrasi Presiden Johnson

bertindak sangat hati-hati terhadap Indonesia. Marshall Green, Dubes AS untuk Indonesia sangat memahami kebencian PKI terhadap AS, karena itu ia bertindak sangat hati-hati dan penuh kesederhanaan. Salah satu hal penting yang telah dilakukan oleh AS seperti yang tersebut di atas, yaitu memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Terdapat orang-orang yang cukup berkualitas dalam usaha memperbaiki hubungan luarnegeri, antara lain yaitu Penasihat Ekonomi Presiden dibawah Prof. Widjojo Nitisastro, Menlu Adam Malik, Dubes Indonesia untuk AS Soedjatmoko yang dibantu oleh Ali Alatas selaku Political Councillor. Sedangkan tokoh AS yang menonjol ialah Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green, dan utusan Presiden Johnson, Hubert Humprey.²³

Hubungan Indonesia-AS bukanlah hubungan antar sekutu, karena Indonesia selalu mengumandangkan prinsip prinsip non aligned-nya terhadap AS, meskipun hubungan ini sejak awal masa orde baru telah terjalin dengan baik dan proporsional. Oleh karena itulah barangkali yang membuat AS meletakkan orang-orang yang profesional yang berasal dari State Department, AID (Agency for International Development), NSC (National Security Council), dan DoD (Department of Defense). Hal ini merupakan suatu keberuntungan bagi Indonesia, karena justeru pada masa ini AS sedang

²³ Yusuf Wanandi, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat Selama Orde Baru, Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi, dalam Bantarto Bandoro, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, CSIS, Jakarta, hal 16-17

menghadapi perang Vietnam yang tengah berkecamuk. Perang Vietnam memang sedang menjadi perhatian utama AS pada masa ini, tetapi karena tekanan yang sangat gencar dilayangkan oleh berbagai kalangan di AS, maka presiden Johnson mengakhiri jabatannya sebelum masa jabatannya sendiri berakhir.

AS dan Indonesia yang diwakili oleh para duta besar kedua negara telah berhasil mencapai kesepakatan, padahal hal ini tidak mudah dicapai oleh AS di negara manapun di dunia. Hal ini dikarenakan AS merupakan negara adikuasa yang rakyatnya pada umumnya bersifat *inward looking* dan *narcistic* (memperhatikan diri sendiri yang cukup besar). Oleh karena itu tidak mengherankan bila para Duta Besar AS di Jakarta selalu terdiri dari para pejabat profesional di State Department, seperti Marshall Green, Frank Gilbraith, Edward Masters, John Holdridge, David Newson, Paul Wolfowitz dan John Monjo. Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih berpengalaman.

2.2.2 Hubungan AS-Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Nixon (1968-1972)

Presiden Nixon menggantikan Lyndon Johnson pada tahun 1968 dan terkenal dengan 'Nixon Doctrine'. Pada masa ini, telah terjalin hubungan yang baik antara Nixon dengan Presiden Soeharto. Di mata Nixon, Soeharto tidak memiliki cacat, sehingga ia berusaha membantu Soeharto dengan segala apa

yang diperlukannya. Pada masa ini pula, hubungan kedua negara terengah berada pada puncaknya, yaitu dengan adanya bantuan ekonomi IGGI yang sepertiganya berasal dari AS untuk jangka waktu yang lama sampai pada awal 1980-an, ditambah lagi dengan PL-480, yaitu bantuan perwira-perwira ABRI, dan FMS (kredit untuk pembelian persenjataan ABRI). Kedua presiden juga saling mengadakan kunjungan kenegaraan.

Hubungan erat ini semakin meningkat manakala AS kemudian secara khusus meminta kepada Indonesia untuk mengirimkan pasukan-pasukan dalam rangka ICCS (International Commission for Control and Security) yang berguna untuk mengawasi hasil-hasil Konferensi Paris di tahun 1973, dan untuk memisahkan pasukan-pasukan Vietnam Utara dan gerilya-gerilyanya, dan pasukan Vietnam Selatan di bagian selatan. Usaha ini sebenarnya dilakukan Indonesia tidak saja untuk mempererat persahabatan dengan AS, melainkan pula untuk turut andil dalam penyelesaian konflik yang pelik di kawasan Asia Tenggara. Walaupun begitu, pembukaan hubungan diplomatik antara AS dengan Cina pada 1971-1972, oleh Nixon telah dipandang dengan penuh kecurigaan oleh Indonesia, mengingat keterlibatan Cina dalam aksi G30S/PKI. Kecurigaan ini masih terus ada hingga normalisasi hubungan RRC-Indonesia pada tahun 1990.

Presiden Nixon adalah penganut *real politics* yang sesuai dengan kepentingan nasional AS pada saat itu. Ia tidak terlalu mengedepankan ideologi dan identitas AS sebagai sasaran dari kebijakan luar negeri AS. Hal ini cukup

menguntungkan Indonesia karena AS menerima Indonesia sebagai negara yang perannya cukup penting di kawasan Asia Tenggara. Atas hubungan baik antara presiden kedua negara pulalah, Indonesia bisa berharap lebih banyak, antara lain dengan bantuan AS yaitu ODA (Official Development Assistance) yang sangat membantu usaha rehabilitasi ekonomi Indonesia pada 1967-1969. Tetapi berdasarkan real politics Nixon, AS telah mengadakan normalisasi hubungan dengan Cina yang sebelumnya dianggap sebagai kantong komunis di Asia. Hal ini telah mengejutkan client states AS sendiri, yang merasa tidak dapat lagi bergantung pertahanannya pada AS lagi. Sebaliknya Indonesia, sebagai sebuah negara yang non-aligned, lebih siap menerima, sehingga kedua negara telah berhasil mencapai kesepakatan dan dukungan.²⁴

2.2.3 Hubungan AS-Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Gerald Ford (1973-1976)

Nixon digantikan Ford setelah skandal *Watergate* yang dilakukan Nixon yang telah menghebohkan rakyat AS. Pada masa ini, pemerintahan AS masih bersifat peralihan yang masih sibuk mengatasi masalah-masalah besar seperti *Watergate* dan kekalahan AS dalam Perang Vietnam pada tahun 1975.

Didalam kebijakan luar negeri, telah terjadi suatu perubahan dalam pengambilan keputusan, antara lain yaitu penghapusan sistem 'bipartisanship', pergeseran kedudukan Kongres AS yang menjadi lebih kuat dalam menentukan

²⁴ Ibid, hal 19-21

pengambilan keputusan daripada pihak administrasi seperti sebelumnya, serta perhatian terhadap pelaksanaan HAM, *rule of law*, serta diterapkan atau tidaknya demokrasi. Karena peran Kongres yang lebih kuat ini, maka kunjungan delegasi Indonesia dibawah komando Ali Moertopo pada 1975 dilotakkan pula landasan hubungan dengan Kongres AS, termasuk didalamnya adalah pidato Moertopo yang dimasukkan ke dalam *Congressional Record*.

Hubungan antara AS-Indonesia di masa ini berjalan dengan cukup baik, dan terdapat usaha untuk meningkatkan hubungan dalam bentuk bantuan peralatan yang lebih banyak kepada ABRI. Kondisi ini dipcrkuat dengan hubungan baik antara Duta Besar Roesmin Nurjadin di Washington D.C, dan David Newson di Jakarta.

Pada masa ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan di dalam negeri yang mendapatkan perhatian dunia Internasional yaitu masalah integrasi Timor-Timur (Tintim) dengan Indonesia. Pada awalnya Indonesia hanya bermaksud memberikan bantuan kepada Apodeti dan UDT, dua partai di Tintim yang menyetujui integrasi Tintim dengan Indonesia, untuk menyelesaikan perang saudara dengan Fretilin, partai yang tidak menyetujui Tintim berintegrasi dengan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia justru mengirimkan angkatan bersenjata ke Tintim yang bertujuan untuk mencegah Fretilin mendapatkan pengakuan kedaulatan Tintim dari negara luar. Indonesia juga melakukan diplomasi terhadap Australia dan Portugis, sehingga kedua negara ini sepakat mendukung integrasi Tintim ke

wilayah Indonesia dimana integrasi tersebut berhasil dilaksanakan pada 17 Juli 1976.

Akan tetapi, kehadiran Presiden Ford dan Menlu Henry Kissinger ke Jakarta, sempat diduga sebagai persekongkolan politik antara mereka dengan Presiden Soeharto untuk melakukan operasi militer di Timtim. Namun ternyata tuduhan itu dianggap tidak beralasan karena operasi tersebut sudah dipersiapkan ketika mereka sedang berada di Jakarta.

Di dalam negeri AS sendiri sebenarnya, terdapat banyak pertanyaan mengenai perlakuan HAM di Timtim, antara lain berasal dari Kongres dan media massa,²⁵ namun hal ini dapat diredam karena administrasi presiden Ford sendiri tidak mempermasalahkan perihal integrasi Timtim ke Indonesia. Mereka bahkan menambah bantuan *basic human needs* dengan bantuan AID melalui CRS (Catholic Relief Services) dan ICRC (International Committee of the Red Cross).²⁶

2.2.4 Hubungan AS-Indonesia pada masa Pemerintahan Jimmy Carter (1976-1980)

Pemerintahan Jimmy Carter diawali oleh suatu perubahan yang mendasar di dalam arah kebijakan politik luar negeri. Hal tersebut antara lain

²⁵ Dalam usaha invasi Timtim ke wilayah Indonesia, Indonesia melakukan operasi militer di Timtim untuk melawan pemberontakan Fretilin yang dijuluki Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Diperkirakan sebanyak 100.000 warga Timtim tewas sebagai akibat langsung maupun tidak langsung operasi-operasi militer dan invasi. Hal inilah yang kelak dipermasalahkan oleh dunia Internasional (yang justeru dipelopori oleh AS) dengan tuduhan Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang serius pada saat proses invasi. Disamping itu, keabsahan integrasi Timtim ke Indonesia juga dipertanyakan.

yaitu fokus kebijakan luar negeri AS lebih besar diarahkan kepada permasalahan hak hak asasi manusia, menitikberatkan pemenuhan *basic human needs* terutama di negara-negara dunia ke tiga, serta diadakannya Dialog Utara-Selatan.

Menurut Presiden Carter, *real politics* yang dicetuskan oleh Presiden Nixon dan Menlu Kissinger tidak sesuai lagi diterapkan ke dalam lingkungan dunia Internasional. Karena itulah Carter melakukan pendekatan-pendekatan baru dalam hubungan internasional, yaitu :

1. Menciptakan dialog Utara-Selatan dan mengurangi konfrontasi Timur-Barat yang tidak bisa dimenangkan oleh satu pihak karena persenjataan nuklir.
2. Membantu Global Basic Human Needs terutama melalui perangkat-perangkat Internasional dan multilateral, disamping usaha-usaha bilateral.
3. Mendukung pelaksanaan hak-hak asasi manusia secara terbuka.

Walaupun Carter telah menerapkan suatu idealisme yang layak mendapatkan pujian, namun pada kenyataannya praktik hubungan internasional belum berubah. Masih juga terdapat usaha-usaha untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan, antara lain dengan serangan Uni Sovyet ke Afghanistan, di samping masalah Angola, Ethiopia, dan Kamboja. Apalagi, usulan Carter untuk mengurangi persenjataan nuklir ditentang. Sehingga pada akhirnya tiga gagasan Carter diatas dianggap suatu kelemahan yang menyebabkan ia menjadi

²⁶ Bantarto Bandoro, hal 21-24

yaitu fokus kebijakan luar negeri AS lebih besar diarahkan kepada permasalahan hak hak asasi manusia, menitikberatkan pemenuhan *basic human needs* terutama di negara-negara dunia ke tiga, serta diadakannya Dialog Utara-Selatan.

Menurut Presiden Carter, *real politics* yang dicetuskan oleh Presiden Nixon dan Menlu Kissinger tidak sesuai lagi diterapkan ke dalam lingkungan dunia Internasional. Karena itulah Carter melakukan pendekatan-pendekatan baru dalam hubungan internasional, yaitu :

1. Menciptakan dialog Utara-Selatan dan mengurangi konfrontasi Timur-Barat yang tidak bisa dimenangkan oleh satu pihak karena persenjataan nuklir.
2. Membantu Global Basic Human Needs terutama melalui perangkat-perangkat Internasional dan multilateral, disamping usaha-usaha bilateral.
3. Mendukung pelaksanaan hak-hak asasi manusia secara terbuka.

Walaupun Carter telah menerapkan suatu idealisme yang layak mendapatkan pujian, namun pada kenyataannya praktik hubungan internasional belum berubah. Masih juga terdapat usaha-usaha untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan, antara lain dengan serangan Uni Sovyet ke Afghanistan, di samping masalah Angola, Ethiopia, dan Kamboja. Apalagi, usulan Carter untuk mengurangi persenjataan nuklir ditentang. Sehingga pada akhirnya tiga gagasan Carter diatas dianggap suatu kelemahan yang menyebabkan ia menjadi

²⁶ Bantarto Bandoro, hal 21-24

kurang populer diantara masyarakat AS. Ia juga dianggap terlalu lemah dalam menghadapi Uni Sovyet, serta penyanderaan diplomat AS di Iran.

Administrasi Carter sangat peduli dan menaruh perhatian terhadap human rights, dan melakukan cara-cara tekanan politik demi tegaknya HAM di suatu negara, dibawah pimpinan Pat Derian. Namun dalam konteks ini, Indonesia sejak tahun 1974 telah mulai melepaskan tahanan politik G 30S/PKI golongan B, yang memang telah masuk ke dalam program pelepasan tiap akhir tahun, sehingga Indonesia menolak tuduhan pelanggaran HAM atau Grossing Violating Human Rights secara frontal. Demikian pula dengan masalah Timor Timur, Administrasi Carter tidak menaruh perhatian khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena masalah Timtim kurang populer di kalangan Kongres, maupun masyarakat AS secara umum. Namun lebih daripada itu, tidak ada atau belum ada kepentingan AS terhadap permasalahan tersebut, sebab masih ada permasalahan lain yang dianggap lebih penting.

Di lain pihak, ada dua tindakan Carter yang dinilai Indonesia kurang tepat, yaitu yang pertama adalah mengenai penarikan mundur pasukan Angkatan Darat dari Korea Selatan secara sepihak pada masa awal pemerintahannya. Sebab, hal ini sempat menjadikan negara-negara sekutunya ragu atas komitmen AS menyelesaikan permasalahan di kawasan itu, mengingat kepercayaan sekutu-sekutu AS belum pulih akibat perang Vietnam. Kedua, yaitu mengenai normalisasi hubungan dengan Cina, dimana AS memanfaatkan Cina untuk menyerang Vietnam pada bulan Februari 1979, dalam kerangka

permusuhannya dengan Uni Sovyet yang melindungi Vietnam Utara. Hal ini sangat ditentang oleh negara-negara didalam ASEAN, terutama Indonesia, karena menurut pandangan Indonesia, tidaklah pad tempatnya suatu negara besar (RRC) yang ditakuti di kawasan menyerang secara militer suatu negara di sub-kawasan.

Namun secara umum hubungan Indonesia dengan pemerintahan Carter cukup baik, terbukti dengan turut sertanya AS ke dalam pertemuan-pertemuan dengan negara-negara mitra dialog yang diselenggarakan Indonesia di Bali pada tahun 1979 yang dikenal dengan pertemuan ASEAN-PMC (Post Ministerial Conference). Disamping itu pada tahun 1977 diselenggarakan Konferensi Asia-Pasifik pertama di Bali . Dalam konferensi ini dibicarakan mengenai kehadiran AS di kawasan, terutama mengenai Administrasi Carter, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta mendengarkan pendapat-pendapat negara-negara di kawasan terutama ASEAN, tentang kehadiran AS itu pula.²⁷

2.2.5 Hubungan AS-Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1980-1988)

Pemerintahan Reagan secara umum bersifat lebih mengedepankan ideologi negara dan konsep unilateralis. Posisi negara-negara non-aligned seperti Indonesia cukup sulit karena dengan seringnya negara-negara tersebut

²⁷ Ibid, hal 24-31

memberikan suara di PBB untuk melawan AS, maka negara-negara tersebut diancam akan diberhentikan bantuan ODA-nya oleh AS. Begitu pula Dialog Utara-Selatan mengalami kemacetan pada masa ini. Namun kemudian, pemerintahan Reagan menjadi lebih realistis karena tidak dapat lagi menghindari perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada Uni Sovyet dengan kepemimpinan Gorbachev, peran Kongres untuk bantuan Kontra di Nikaragua, sanksi di Afrika Selatan, serta pentingnya bantuan untuk sektor swasta daripada memberikan ODA atau bantuan dari badan-badan finansial internasional pada swasta. Disamping itu pemerintahan Reagan mendapatkan suatu keputusan penting yaitu dengan mewujudkan peningkatan persenjataan dari *star wars*, meningkatkan peran kekuatan swasta, dan memberikan ODA yang bersifat strategis terhadap Israel, Mesir, Pakistan, Turki, dan Filipina.

Perkembangan kondisi dalam negeri AS sendiri sangat memerlukan perhatian Reagan, terutama mengenai perkembangan perekonomian dalam negeri yang mengalami *twin deficits*, kurangnya saving dan investasi, kurangnya perhatian terhadap pendidikan, penelitian, dan pada rakyat miskin. Di satu sisi, perekonomian dunia semakin bergerak ke arah *free market system*, karena adanya globalisasi ekonomi dan ekonomi pasar, terutama di negara-negara berkembang.

Hubungan RI-AS sebenarnya cukup baik pada masa ini, hal ini disebabkan antara lain dengan adanya orang-orang yang profesional di kedua belah pihak yang mengatur hubungan bilateral kedua negara. Walaupun

demikian, Indonesia tetap merasakan akibat-akibat dari kebijakan umum dan global dari Administrasi Reagan, seperti misalnya dikurangnya bantuan ODA untuk Indonesia, karena Indonesia tidak termasuk dalam sasaran strategis bantuan ODA AS.

Selanjutnya, pengaruh-pengaruh AS terhadap Indonesia dirasakan baik melalui peringkat multilateral maupun peringkat bilateral.

Peringkat Multilateral

Administrasi Reagan cenderung untuk meningkatkan kemampuan militernya. Namun hal ini sempat dihambat oleh usaha-usaha pengawasan dan perlucutan senjata baik melalui PBB ataupun melalui mekanisme regional dan bilateral. Apalagi Indonesia juga aktif terlibat di dalamnya, terutama dalam SEANWFZ (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone). Karena itulah hubungan dengan AS tidak cukup harmonis dalam kerangka ini. Hambatan lain terlihat pula dalam konteks *North-South Dialogue*, karena ideologi pemerintahan Reagan tidak menginginkan campur tangan negara dalam perekonomian. Ia lebih suka jika perekonomian diserahkan kepada *free market system* untuk melaksanakannya. Padahal Indonesia merupakan pendukung yang kuat untuk Dialog Utara-Selatan, terutama dalam forum PBB, Kelompok 77, dan Gerakan Non Blok. Pada akhirnya pendirian AS tersebut terbukti seiring dengan berdirinya PECC (Pacific Economic Cooperation Council) dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Kedua lembaga ini terbukti dapat

dijadikan alat oleh negara-negara industri maju agar ekonomi negara-negara berkembang terikat pada ekonomi negara-negara maju, daripada yang telah diusahakan oleh Dialog Utara-Selatan. Pendekatan ini terbukti dapat merangkul lebih erat negara-negara di Asia –Pasifik termasuk Indonesia, kedalam suatu *economic relationship* yang saling menguntungkan.

Ganjalan lain dalam hubungan Indonesia-AS dalam level multilateral adalah mengenai penolakan AS terhadap hasil-hasil Konferensi Hukum Laut yang justeru sangat penting bagi Indonesia lantaran prinsip archipelagic yang menjamin wilayah Indonesia menjadi tiga kali lebih besar dari semula yang belum ditambah lagi dengan EEZ (Exclusive Economic Zone). Pemerintahan Reagan berpendapat bahwa kekayaan alam di dasar laut dikuasai oleh pemerintah melalui suatu International Authority, tetapi harus diserahkan kepada swasta untuk mengolahnya. Tetapi perdebatan mengenai hal ini tidak terlalu meruncing dalam kerangka hubungan bilateral antara kedua negara dengan diterimanya prinsip wawasan nusantara didalam Double Taxation Agreement diantara kedua negara.

Peringkat Bilateral

Hubungan baik kedua negara pada peringkat bilateral diawali dengan saling kunjungan kedua presiden masing-masing negara. Presiden Soeharto mengunjungi AS pada 1982 dan dibalas oleh kunjungan Presiden Reagan ke Indonesia pada 1986. AS juga tetap mendukung Indonesia di dalam badan-

badan keuangan Internasional, walaupun bantuan ODA-AS untuk Indonesia berkurang.

Dubes AS untuk Indonesia John Holdridge adalah seorang dubes yang cukup aktif dan meskipun pada awalnya ia berpihak pada Cina, namun kemudian ia justru dapat membantu memperlancar investasi AS di Indonesia.

Dubes yang kedua pada masa ini, Paul Wolfowitz (yang kelak menjadi Menlu pada pemerintahan Presiden George Walker Bush) merupakan tokoh muda yang cukup berpengalaman di dalam Departemen Pertahanan AS. Ia sangat populer dan menjalin hubungan yang baik dengan semua kalangan.

Salah satu hal yang patut dicatat di sini ialah bahwa pada masa pemerintahan Reagan, titik berat hubungan Indonesia –AS beralih dari bantuan ODA yang berkurang ke arah kebijakan *export-led growth*, yang dilandaskan pada strategi deregulasi dan peningkatan peran swasta. Perkembangan ini menyebabkan kedua negara terlibat dalam kerjasama perdagangan yang semakin menonjol, yang mengharuskan Indonesia tetap berhubungan baik dengan AS untuk menjaga agar hubungan perdagangan tersebut tetap lancar. Hubungan ini melibatkan pula departemen-departemen hubungan perekonomian AS, antara lain yaitu *department of Commerce*, *US Trade Representatives*, *Treasury Department* dan *Department of Agriculture*. Peranan Kongres juga sangat diperhatikan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang proteksionis, atau perubahan-perubahan kebijakan negara lain yang dianggapnya diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan AS.

Selain hubungan ekonomi yang semakin meningkat, hubungan di bidang politik dengan Administrasi Reagan juga tidak terdapat masalah serius dan cukup stabil, hal ini disebabkan pula oleh stabilitas Indonesia yang cukup mantap. Sedangkan hubungan di bidang kebudayaan diwujudkan dengan berdirinya KIAS (Kebudayaan Indonesia-AS) dan hubungan lain di bidang pendidikan dengan semakin banyaknya pemuda Indonesia yang menimba ilmu di AS.²⁸

2.2.6 Hubungan Indonesia-AS pada Masa Pemerintahan George Bush (1988-1991)

Administrasi Bush yang berdiri pada 1988 menghadapi masalah yang cukup serius dalam hubungan luar negerinya, yaitu campur tangan AS didalam penyelesaian konflik di kawasan Teluk, serta kondisi AS yang sedang menghadapi masa-masa menjelang berakhirnya Perang Dingin dan Containment Policy-nya. Hal ini menyebabkan perhatian utama pemerintahan Bush terletak pada Timur Tengah, Uni Sovyet, dan Eropa, disamping terhadap Amerika Latin (Mexico). Karena itulah, perhatian terhadap kawasan Asia Pasifik telah berkurang. Namun, sebelum krisis Teluk terjadi, Presiden Bush telah mendukung APEC dan PECC dimana Indonesia aktif di dalamnya, dan menjadikannya sebagai landasan kerjasama regional yang terpenting di bidang ekonomi dan politik di kawasan Asia Pasifik. Disamping itu pula, kehadiran

²⁸ Ibid, hal 31-41

militer AS di kawasan ini terus dipertahankan untuk mendukung kepentingan AS.

Perhatian Bush terhadap Indonesia diwujudkan melalui ASEAN dengan adanya kunjungan Wapres Quale ke negara-negara ASEAN di tahun 1990. Sebaliknya, Indonesia juga mendukung AS yang memiliki suara dominan dalam DK PBB untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap Irak atas invasinya terhadap Kuwait. Hal ini tetap dilakukan Indonesia walaupun didalam negeri terdapat protes, serta unjukrasa menentang sanksi PBB tersebut. Namun gerakan-gerakan ini bersifat underdog dan dapat diatasi dengan mudah oleh pemerintah.

Terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian di dalam kelangsungan hubungan kedua negara, antara lain adanya protes AFL-CIO (American Federation of Labour-Congress of Industrial Organization) mengenai perlakuan, gaji, dan kebebasan buruh Indonesia dalam berorganisasi, yang dapat menghalangi GSP barang-barang Indonesia ke AS. Selain itu juga masalah Intellectual Property Rights dan Copy Rights terhadap film-film yang diimpor dari AS. Kedua, yaitu mengenai masalah hak-hak asasi manusia (HAM) yang terus mendapatkan perhatian yang besar dari administrasi Bush yang menuntut pula perhatian pemerintah Indonesia khususnya masalah HAM di Timor-timur. Ketiga, mengenai cara-cara demokrasi di Indonesia terutama

mengenai proses pergantian pemimpin nasional, yang didalam masa ini demokrasi di Indonesia dirasakan belum berkembang dengan baik.²⁹

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam memahami hubungan RI-AS dimasa ini ialah mengenai diselenggarakannya Konferensi Bilateral antara RI-AS untuk yang kesekian kali, yang disponsori bersama oleh CSIS (Jakarta) dan *Centre for Asia Pacific Affairs, The Asia Foundation (San Francisco)* pada 27-31 Agustus 1989 di Bali. Dalam kesempatan ini para delegasi dari kedua negara mencoba membahas hubungan kedua negara secara luas, yang dilihat dari berbagai aspek, antara lain dari aspek ekonomi dan perdagangan, politik, serta keamanan Internasional. Kedua negara mencoba untuk mencari kesepahaman serta mencari jawaban-jawaban yang telah dan sedang berkembang mengenai potensi hubungan kedua negara. Hal ini disebabkan karena antara lain karena perkembangan perdagangan RI yang terus meningkat ke AS, semakin pentingnya kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik baik dari segi ekonomi, politik, dan militer. Berdasarkan hal-hal tersebut, Indonesia telah memikirkan bahwa hubungan baik dengan AS perlu dibina sebaik mungkin, karena AS merupakan sebuah negara *superpower*, sebaliknya Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang yang masih

²⁹ Ibid, hal 41-47

mebutuhkan kerjasama dan dukungan dari negara besar seperti AS untuk lebih berkembang dan untuk mengatasi semua persoalan yang ada.³⁰

2.2.7 Hubungan Indonesia-AS Pada masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton (1992-2000)

Periode hubungan Indonesia-AS pada masa kepemimpinannya Bill Clinton merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah hubungan kedua negara. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa peristiwa yang bersifat sangat kritis dalam kelangsungan hubungan tersebut. Masalah-masalah itu berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan dan proses pelaksanaan HAM terutama yang terjadi di Timor-Timur. Selain itu, hubungan kedua negara juga dipengaruhi oleh proses politik yang tengah terjadi di dalam negeri AS sendiri, dimana Kongres selama kepemimpinan Clinton memiliki hak suara dalam mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri AS, termasuk hubungannya dengan Indonesia.

Salah satu aspek yang patut mendapat sorotan berbagai pihak ialah hubungan Indonesia-AS dibidang pertahanan dan keamanan. Selama beberapa dekade, seperti diketahui, hubungan pertahanan dan keamanan antara AS-Indonesia bisa dikatakan baik-baik saja. Hal ini tercermin dari tetap dilaksanakannya program saling kunjung pejabat senior militer kedua negara,

³⁰ Gary Schuman dan Clara Joewono, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Sebuah Laporan, CSIS, Jakarta, 1990

pertemuan tahunan antar pejabat militer yang mendiskusikan berbagai masalah pertahanan dan keamanan, latihan bersama antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat kedua negara, serta yang tidak dapat ketinggalan ialah bantuan tahunan AS untuk militer Indonesia berupa latihan khusus militer selama beberapa bulan di AS melalui program International Military Education Training (IMET).³¹

Hubungan dibidang pertahanan dan keamanan juga terjalin erat dalam payung regional, dimana semenjak tahun 1977 antara AS dan Indonesia telah terlibat didalam forum dialog antara ASEAN-AS untuk membicarakan masalah-masalah pertahanan dan keamanan, yang dalam perkembangannya selanjutnya lebih dikenal dengan nama ASEAN Regional Forum (ARF). Disamping itu Indonesia melalui ASEAN juga telah diminta AS untuk turut serta dalam pasukan perdamaian untuk Kamboja, dan di masa perang Teluk meletus, Indonesia juga memberi keleluasaan terhadap kapal-kapal perang AS untuk melewati wilayah perairannya.

Namun, hubungan baik di bidang pertahanan dan keamanan ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang memburuk pada masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton, dimulai dengan pembatalan pembelian pesawat F16 AS oleh Indonesia. Masalah ini bermula ketika AS ingin menjual 28 buah pesawat F16

³¹ Hubungan Indonesia-AS di Masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton 1992-2000, PPW LIPI, 2000, hal 46

kepada Pakistan. Tetapi, walaupun Pakistan telah membayar lunas pembelian pesawat itu, pemerintah AS kemudian membatalkan rencana penjualan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah AS atas desakan berbagai pihak yang menentang penjualan F16 kepada Pakistan, dengan alasan Undang-Undang AS melarang AS untuk menjual peralatan militer kepada negara-negara yang sedang mengembangkan ataupun memiliki persenjataan nuklir seperti Pakistan. Atas pembatalan ini kemudian Pakistan menuntut AS untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan senilai US\$ 658 juta. Karena itulah kemudian AS berusaha untuk mencari calon pembeli baru, dan diantara calon-calon yang ada, Indonesia dianggap yang paling potensial untuk membeli pesawat-pesawat tempur tersebut. Akhirnya, melalui negosiasi antara kedua negara, maka dicapai kesepakatan bahwa Indonesia akan membeli pesawat F16 tersebut sejumlah sembilan buah.

Tetapi ternyata, rencana penjualan ini mendapatkan pro dan kontra di dalam negeri AS. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran HAM di Indonesia yaitu dalam kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur (Timtim) dan peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh kubu Soerjadi pada 27 Juli 1996, yang lebih dikenal dengan peristiwa 'Kudatuli'. Peristiwa ini menyebabkan beberapa puluh orang massa pendukung Megawati ditahan oleh aparat keamanan, bahkan sebagian lagi tidak diketahui keberadaannya lagi hingga saat ini. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi sorotan LSM, aktivis HAM, dan Kongres AS, dimana mereka berpendapat

bahwa Indonesia tidak layak membeli pesawat tempur F16 karena pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Disamping masalah HAM, faktor yang turut berpengaruh didalam masalah ini yaitu skandal 'Indogate' atau 'Lippogate', yang melibatkan James Riady, bos PT Lippo yang memberikan sumbangan kepada Partai Demokrat dalam kampanye pemilihan Presiden (Clinton) tahun 1996. Beberapa kalangan di AS khawatir, sumbangan ini akan memengaruhi kebijakan AS terhadap Indonesia. Melihat perkembangan situasi, pemerintah AS kemudian menanggukhan rencana penjualan F16 terhadap Indonesia, sampai penyelidikan atas semua kasus diatas tuntas. Di lain pihak, Indonesia yang juga menghadapi pro dan kontra di dalam negeri atas tindakan AS tersebut, merasa bahwa AS terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Karena itulah, kemudian Indonesia mengambil inisiatif pembatalan pembelian sembilan buah pesawat F16 dari AS, dimana keputusan penting ini diambil pada 6 Juni 1997.³²

Berkaitan dengan keputusan penting pembatalan pembelian F16 diatas, Indonesia kemudian juga menyatakan menarik diri dari program Extended-International Military Education Training (E-IMET). Alasan yang dikemukakan Indonesia dalam pengunduran diri ini senada dengan alasan pembatalan F16, yaitu Indonesia tidak menginginkan campur tangan AS

³² Ibid, hal 48-50

terhadap urusan dalam negeri Indonesia sendiri, dengan mengaitkan Program E-IMET dengan kritik AS atas pelanggaran HAM dan kebijakan Indonesia di Timtim. Keputusan ini juga diambil Indonesia mengingat AS pernah menghentikan program IMET untuk Indonesia karena peristiwa insiden Dili 12 November 1991. Disamping itu Indonesia juga merasa terganggu dengan agenda pembicaraan mengenai Timtim yang hampir selalu ada di setiap pertemuan bilateral antara Indonesia dengan AS. Hal ini berkaitan pula dengan desakan yang terus-menerus dari pemerintahan Clinton agar Timtim diberi otonomi luas untuk urusan lokal.

Diatas semua hal diatas, terdapat satu hal penting yang turut menjadi penentu dalam hubungan Indonesia-AS di masa pemerintahan Bill Clinton, yaitu peranan Kongres yang turut menentukan kebijakan AS terhadap Indonesia. Seperti diketahui, semenjak terjadinya kasus *Watergate* dan kekalahan AS dalam perang Vietnam, Kongres AS kemudian diberi kewenangan yang lebih besar dalam ikut mengambil keputusan politik di AS. Jika sebelumnya Kongres hanya berpengaruh di dalam hal-hal yang bersifat anggaran dalam politik dalam negeri AS, serta hanya mampu meningkatkan perannya pada bidang-bidang yang kurang diminati oleh pemerintah, maka kemudian Kongres berusaha untuk menggunakan kekuatan anggaran untuk ikut menentukan jalannya politik luar negeri AS. Hal ini berkaitan erat dengan pengalokasian sejumlah dana untuk negara tertentu atau menentukan persyaratan-persyaratan khusus bagi bantuan luar negeri melalui perundang-

undangan. Presiden memang memiliki hak veto untuk ini, tetapi veto tersebut bisa dianulir oleh persetujuan dua pertiga anggota Kongres. Walaupun demikian, kekuasaan veto presiden sangat dibatasi oleh kecenderungan diajukannya RUU yang menyangkut permasalahan yang amat luas, atau masalah-masalah yang kurang relevan. Presiden juga tidak dapat menolak hanya sebagian dari suatu RUU, namun hanya boleh menerima atau menolak seluruhnya saja. Hal ini dimanfaatkan oleh Kongres dengan memasukkan bagian ketentuan yang kontroversial ke dalam suatu RUU yang penting, sehingga presiden dihadapkan pada pilihan antara menerima ketentuan yang tidak dikehendaknya atau memveto suatu Undang-Undang yang diperlukan.³³

Di dalam kasus penghentian bantuan IMET dan penghentian bantuan ekonomi terhadap Indonesia, Kongres memberikan pengaruh yang amat besar, terutama karena hal tersebut berkaitan dengan pengalokasian dana anggaran pemerintah AS ke suatu negara. Namun, disamping karena kekuasaannya dalam soal anggaran, di dalam tubuh Kongres sendiri juga terdapat persaingan antar *Congresman* yang berebut pengaruh agar ia terpilih kembali di daerah pemilihannya. Contoh yang dapat disebutkan ialah seorang senator bernama Patric Kennedy, anggota Kongres dari daerah pemilihan Rhode Island yang mayoritas warganya adalah keturunan Portugal, mengajukan usul secara radikal untuk menghentikan bantuan ekonomi dan militer AS terhadap Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM di

³³ *Ibid*, hal 8-9

Timtim. Bahkan ia mengajukan RUU tentang sanksi terhadap Indonesia bernama East Timor Human Right Accountability Act. Hal tersebut dilakukan Kennedy untuk menarik simpati di daerah pemilihannya agar ia terpilih kembali menjadi senator dari wilayah Rhode Island untuk periode selanjutnya.

Pada akhirnya, hubungan Indonesia-AS di masa ini berujung pada proses demokrasi di Indonesia menjelang jatuhnya Soeharto. AS mendukung usaha-usaha penggulingan Soeharto yang dinilainya telah bertindak secara otoriter. Belajar dari kasus demokrasi yang terjadi di Iran dan naiknya pemerintahan Khomeini, pada saat ini AS memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil kepada oposisi-oposisi pemerintah Soeharto mulai kepada tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid, maupun kepada LSM-LSM serta organisasi-organisasi massa yang memperkuat tekanan untuk menjatuhkan Soeharto. Salah satu bukti yang jelas yaitu adanya bantuan lembaga NGO (Non Government Official) AS seperti United States Agency for International Development (USAID), yayasan-yayasan swasta AS seperti The Ford Foundation, The Asia Foundation, National Democratic Institute (NDI) yang bekerjasama dengan LSM-LSM di Indonesia untuk membangun jaringan pembentuk kesadaran politik rakyat, pemberdayaan rakyat, dan membangun cikal bakal masyarakat madani di Indonesia. Hal ini dapat berupa pemberian dana untuk membiayai seminar-seminar, program aksi pendidikan rakyat dan para anggota DPRD, penerbitan buku, serta menghadiri undangan seminar atau kegiatan yang

berkaitan dengan demokrasi baik di AS maupun di negara lain. Hal terakhir yang dilakukan AS dalam penegakan demokrasi di Indonesia adalah memperlemah kekuatan militer Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui isu pelanggaran HAM oleh aparat TNI, seperti yang terjadi di Timtim. Sejak 1992 seperti telah diketahui bahwa kalangan Kongres selalu berusaha mengaitkan bantuan ekonomi AS ke negara-negara lain termasuk Indonesia dengan penegakan HAM di negara tersebut. Kongres menuduh bahwa pemerintah AS dan Bank Dunia secara tidak langsung turut membiayai TNI untuk melakukan pelanggaran HAM di berbagai tempat. Namun, pemerintah AS berdalih bahwa kepentingan AS terhadap Indonesia dinilai masih besar, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup penting di kawasan Asia Tenggara.³⁴

2.3 Hubungan Indonesia-AS di masa Orde Reformasi

Orde Reformasi diawali dengan jatuhnya Soeharto dari kepemimpinan nasional, dan munculnya tokoh-tokoh baru yang diperkirakan akan menggantikan Soeharto. Orde Reformasi juga mendukung-dengungkan proses demokrasi dalam segala bidang baik di bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berikut ini akan dibahas hubungan Indonesia-AS pada masa Reformasi yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid.

³⁴ Ibid, hal 93-96

2.3.1 Hubungan Indonesia-AS pada Masa Pemerintahan Habibie (1998-1999)

Sebagai presiden di masa peralihan, Habibie harus menghadapi banyaknya tuntutan reformasi di segala bidang. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat ia merupakan salah satu tokoh Orde Baru dan lebih daripada itu Habibie adalah seorang teknolog, yang tidak piawai atau ahli dalam memimpin proses politik yang sedang terjadi. Banyaknya tekanan terhadap presiden jejas terlihat, terutama tuntutan untuk segera melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil, serta pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Namun Habibie terbukti mampu membawa suasana yang kondusif bagi proses demokrasi di dalam negeri, dengan keputusannya tentang kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik. Namun di sektor ekonomi, Habibie belum mampu untuk membawa perbaikan yang berarti, yang hal ini dimaklumi sebagai resiko peninggalan Soeharto.

Tantangan dalam negeri yang sekaligus sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia pada masa ini ialah mengenai pelaksanaan Jajak Pendapat di Timtim. Seperti diketahui, konflik berkepanjangan di Timtim telah melahirkan dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu Pro-Integrasi dan kubu Pro-Kemerdekaan. Konflik di antara keduanya telah mengundang keprihatinan Internasional termasuk AS, karena korban yang ditimbulkan. Mereka pada umumnya mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan Timtim, yang didalamnya terdapat muatan pelanggaran HAM. Melihat situasi diatas, maka pemerintahan Habibie

memberanikan diri untuk menyelenggarakan jajak pendapat (referendum) di Timtim untuk menentukan apakah Timtim masih tetap bergabung dengan RI ataukah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dengan dibantu oleh badan PBB yaitu UNTAET. Hasil dari referendum tersebut sangat mengejutkan, dimana pihak pro-kemerdekaan mengantongi kemenangan telak, dengan perbandingan 22.78 persen suara. Kenyataan ini sangat memukul pihak pro-integrasi (milisi) dan mereka menyatakan tidak puas dengan hasil jajak pendapat tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu kerawanan keamanan di Timtim dengan cukup serius, antara lain dengan terjadinya aksi bumi hangus, kekerasan, pembunuhan, penculikan, serta pengungsian massal. Kekacauan dan kerawanan ini dianggap oleh masyarakat Internasional sebagai tanggungjawab Indonesia, disamping Indonesia juga dituduh membantu dan berpihak kepada kelompok pro-integrasi. Indonesia juga dianggap bertindak lamban dalam menyelesaikan masalah di Timtim.

Indonesia kemudian mendapat tekanan dari dunia Internasional untuk menerima kedatangan pasukan perdamaian PBB di Timtim, guna membantu pemulihan keamanan di sana. AS bahkan bertindak dengan sangat keras, dengan menghentikan bantuan militer ke Indonesia (embargo militer) senilai USD 476.000 yang dinyatakan secara resmi pada 9 September 1999. Jika embargo militer ini tidak berhasil menggugah Indonesia untuk memutuskan hubungan dengan kaum milisi serta menerima kedatangan pasukan perdamaian

PBB, maka AS mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Indonesia. Ancaman ini dikemukakan langsung oleh Presiden Bill Clinton.

Bahkan, senator Russ Feingold dari Partai Demokrat membuat RUU yang berisi pemutusan bantuan ekonomi terhadap Indonesia, yang jika disetujui maka akan memutus hubungan Indonesia-AS di segala bidang. Namun, pemerintah AS sekali lagi masih berpikir seribu kali atas isi RUU tersebut, dikarenakan masih besarnya kepentingan AS terhadap Indonesia.

Pada akhirnya karena desakan yang semakin kuat dari banyak pihak, maka pemerintah Indonesia kemudian terpaksa menerima kedatangan pasukan perdamaian PBB yang dikenal dengan nama International Force for East Timor (Interfet) dibawah Komando Mayor Jenderal Peter Cosgrove dari Australia. Hal ini terjadi setelah adanya pencabutan Ketetapan MPR tahun 1976 yang menyangkut soal kedaulatan Timtim dalam wilayah RI, dalam SU MPR bulan Oktober 1999, yang juga menjatuhkan Habibie dari kursi Presiden.³⁵ Bahkan, dengan adanya campur tangan Australia dalam masalah ini, hubungan Indonesia-Australia sempat menegang. Tetapi Indonesia tidak mampu berbuat apapun, sebab Australia juga didukung oleh negara besar seperti AS.

2.3.2 Hubungan Indonesia-AS pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

³⁵ Ibid, hal 54-56

Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden menggantikan Habibie, setelah melalui proses politik yang dinilai paling demokratis. Ia terpilih oleh wakil-wakil di MPR hasil Pemilu tahun 1999 yang secara kuantitas fraksi didominasi oleh partai-partai politik Islam. Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan tokoh terkemuka organisasi Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang juga merupakan cucu pendirinya yaitu KH Wahid Hasyim. Ia dikenal sebagai pribadi yang berani mengemukakan pendapat pada masa reformasi, piawai melakukan manuver politik dan yang terpenting memiliki massa pendukung yang sangat besar yaitu dari masyarakat golongan NU. Gus Dur terpilih menjadi presiden adalah akibat dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai-partai Islam yang tidak menginginkan Megawati Soekarnoputri tampil menjadi presiden. Mereka sepakat mengantarkan Gus Dur menjadi presiden karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pendukung Megawati adalah pemenang Pemilu yang memiliki kursi yang amat besar di DPR /MPR, dan sangat mungkin mengantarkan Megawati menjadi presiden. Kemenangan partai-partai Islam menjadikan Gus Dur sebagai presiden disambut gegap gempita oleh masyarakat Islam khususnya NU dan dianggap sebagai kemenangan umat Islam yang paling bersejarah semenjak NKRI berdiri. Sebaliknya, kenyataan ini dianggap sangat mengecewakan kubu PDIP, meskipun pada akhirnya Megawati menjadi Wakil Presiden.

Pemerintahan Gus Dur bersifat sangat khas. Hal ini disebabkan oleh gaya kepemimpinan Gus Dur yang gemar melontarkan ucapan-ucapan yang

sangat kontroversial terhadap pihak-pihak tertentu. Selain itu Administrasi Gus Dur telah pula mengurangi dengan sedikit atau banyak peraturan-peraturan kepresidenan dan protokoler negara yang biasa dilakukan pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, seperti pembacaan pidato tanpa teks resmi, serta kelonggaran memasuki istana kepresidenan. Gus Dur juga menempatkan orang-orang kepercayaan di sekelilingnya untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Selain itu, kabinet Gus Dur sering mengadakan reshuffle kabinet, yang sering disebabkan oleh subyektifitas Gus Dur sendiri.

Didalam melaksanakan politik luar negeri, Gus Dur dikenal sering melakukan perjalanan ke luar negeri, diantaranya yang paling kontroversial adalah kunjungannya ke Cina, India, dan Israel. Tujuan kunjungan ini adalah untuk membuka hubungan perdagangan dengan Israel yang ditentang oleh banyak pihak di dalam negeri. Hal ini berkaitan pula dengan ketidak inginan Gus Dur didikte oleh AS, dimana sejak AS menghentikan bantuan militer terhadap Indonesia lalu diikuti oleh Australia dan negara-negara Uni Eropa, Gus Dur memimpin pembelian senjata dari RRC dan Israel. Tindakan Gus Dur ini kemudian membuat AS berpikir kembali untuk membuka hubungan kerjasama militer yaitu latihan bersama Angkatan Laut kedua negara yang dilaksanakan pada Juni 2000. Namun begitu, masih banyak lagi bentuk campurtangan yang lain dari jaringan LSM AS yang mendesak agar Indonesia

membubarkan Kopassus karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh, Timtim, dan Irian Jaya.³⁶

AS juga melakukan tarik ulur dalam memberikan bantuan ekonomi sebagai bagian dari penerapan agenda demokrasinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh IMF yang pasti sangat dipengaruhi oleh AS. Diantara persyaratan-persyaratan itu ialah pemerintahan Gus Dur harus menyelesaikan pengadilan atas para jenderal yang terlibat kasus pelanggaran HAM di Timtim, disamping agenda penegakan demokrasi lainnya seperti pengadilan mantan pejabat negara yang korup. Namun Gus Dur tetap tidak ingin didikte oleh AS dengan melakukan trik-trik politik luar negeri yang terkadang sangat kontroversial.

Pada akhirnya Gus Dur dijatuhkan oleh Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, karena ia dinilai tidak berhasil membawa kemajuan dan penyelesaian banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Disamping itu, ia tersandung kasus 'Buloggate' dan 'Bruneigate' dimana ia diduga terlibat didalamnya. Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya telah mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden.

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara Indonesia-AS mengalami pasang surut yang disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, AS merupakan negara superpower yang memiliki kepentingan untuk

³⁶ ibid hal.96

melindungi kepentingan nasionalnya, dimana dalam hal ini ia akan melakukan apa saja asalkan kepentingannya tercapai. Kedua, walaupun kepentingan AS terhadap Indonesia bersifat pragmatis, namun AS masih memandang bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara, oleh karena itulah dalam banyak kesempatan AS masih berusaha memperbaiki hubungannya dengan Indonesia jika hubungan itu memburuk. Ketiga, yang tidak dapat dipungkiri yaitu bahwa AS memiliki sifat arogan terhadap negara-negara yang bukan sekutunya seperti Indonesia, dengan tujuan agar negara itu tunduk terhadap kemauan AS. Terakhir, yaitu pengaruh kondisi di dalam negeri masing-masing negara yang sangat menentukan kebijakan luar negerinya, sebagai contoh yaitu pengaruh Kongres terhadap kebijakan AS serta karakter presiden-presiden di Indonesia yang sangat berbeda satu sama lain sehingga seringkali berdampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara lain seperti AS.



• BAB III

SEJARAH KELOMPOK ISLAM DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK DI INDONESIA

Islam memasuki Indonesia pada Abad XIII yang dibawa oleh para pedagang yang datang dari Asia Selatan. Semenjak diperkenalkan, Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia terutama yang berada di pulau Sumatera dan pulau Jawa, dimana pada saat itu mereka secara mayoritas merupakan pemeluk agama Hindu-Budha yang dianut semenjak berabad-abad sebelumnya. Disini kemudian terjadi akulturasi antara Hindu-Budha dengan Islam, sampai kemudian Islam dapat diterima secara luas dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan, di Jawa dikenal para ulama penyebar agama Islam bernama 'Wali Songo' atau ulama yang berjumlah sembilan.

Dilihat dari jenisnya, pemeluk Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama, disebut kaum Abangan, yaitu pemeluk Islam dari kalangan pedagang yang tidak selalu menjalankan aturan-aturan dan syariat Islam namun mereka mengaku beragama Islam. Golongan kedua adalah kaum priyayi, yaitu masyarakat Jawa yang masih teguh memegang tata cara dan adat Jawa walaupun mereka beragama Islam. Hal ini menyebabkan mereka masih mempercayai hal-hal berbau mistisme dan khayali yang sebenarnya dalam Islam sangat dilarang. Golongan ketiga yaitu kaum Santri, adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh menjalankan tata cara dan syariat Islam serta menggunakannya dalam kehidupan

sehari-hari sebagai *the way of life*. Mereka ini berjumlah paling sedikit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya.

3.1 Organisasi Islam terbesar di Indonesia

Dalam memperjuangkan hak-hak politiknya, seringkali kaum Islam di Indonesia kurang diperhatikan aspirasi politiknya, paling tidak hal ini tercermin dari semenjak masa kemerdekaan, terutama ketika merumuskan dasar negara Pancasila. Namun ada beberapa kelompok Islam yang paling berpengaruh yang akan dijelaskan di sini, yaitu antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Pesantren yang merupakan tempat bagi kaum santri untuk mengembangkan ajaran Islam.

3.1.1 Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang bersifat modern serta merupakan gerakan pembaruan Islam yang sangat berbeda dengan organisasi keislaman lain yang bersifat tradisional. Berdirinya Muhammadiyah hingga menjadi salah satu organisasi Islam yang cukup diperhitungkan dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yaitu faktor Tradisionalisme Islam dan Jawaisme, pengaruh modernisme Hindia Belanda, dan faham pembaruan dari Timur Tengah.

Pada faktor yang pertama, pembentukan Muhammadiyah diilhami oleh keinginan K.H. Ahmad Dahlan untuk memurnikan kembali ajaran Islam agar terbebas dari pengaruh non Islami yang dikembangkan oleh kalangan non Islami di lingkungan Kraton Jogja, yaitu berupa kepercayaan-kepercayaan yang berbau mistisme, tahayul, dan kuirafat. Pada faktor kedua, pembentukan

Muhammadiyah dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda yang mengistimewakan kelompok priyayi Jawa, adanya usaha Belanda membuka pintu bagi kegiatan misionaris Kristen sebagai bagian dari kegiatan pendidikan yang dikembangkan, serta adanya pengaruh-pengaruh westernized yang dibawa oleh Belanda dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam faktor ketiga, pengaruh yang tak kalah pentingnya yaitu pemikiran modernisme Islam yang dibawa K.H.Ahmad Dahlan dari Timur Tengah yang telah mendorongnya untuk mendirikan organisasi keislaman yang bersifat modern.³⁷

Maksud dan tujuan Muhammadiyah yang tertuang dalam AD/ART ialah 'menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil, makmur yang diridloi oleh Allah SWT, sedangkan pola gerakannya terbagi menjadi tiga, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid.

Dalam bidang politik, peranan Muhammadiyah bisa dijelaskan dengan memakai analisis terhadap paham keagamaan dan makna khittah perjuangannya. Paham keagamaannya ialah *Ahlussunnah wal jama'ah*, sedangkan khittah atau semangat perjuangannya ialah *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam proporsi dan arti sebenarnya. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tidak akan berubah menjadi partai politik, namun ia tidak

³⁷ Indonesia dan Dinamika Islam Politik, PPW LIPI, 2000, hal 68-77

buta politik, dengan cara ia ikut berperan dalam usaha kenegaraan dan pemerintahan dalam batas-batas *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁸

3.1.2 Nahdlatul Ulama (NU)

NU merupakan gerakan yang ingin mengantar umatnya ke tingkat kedekatan hamba-Nya yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Paham teologi yang dianut ialah *Ahlussunnah wal jama'ah* yang berpegang teguh pada tradisi yaitu mengikuti mazhab Sjafi'i dalam bidang fiqh, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-As'yari dan Imam Abu Mansyur al-Maturidi dalam bidang teologi, serta dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Abu Qasin al-Junaidi. Kedudukan ulama dalam NU sangat dominan dan sangat dihormati, sebab ulama merupakan figur kharismatik yang memiliki basis dukungan masyarakat pedesaan. Ulama juga memberikan sifat kepada NU yaitu identik dengan pesantren.³⁹

Sebagian besar anggota organisasi ini adalah berasal dari kalangan pesantren, yang jumlahnya terbanyak di pulau Jawa. Dengan anggota yang demikian besar, maka wajar jika NU cukup berpengaruh di dalam mengembangkan Islam di Indonesia.

³⁸ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal 213-214

³⁹ *Ibid*, hal 217-219

3.1.3 Pesantren

Secara etimologis pesantren berasal dari kata *pesantrian* yang berarti 'tempat santri' dan juga dapat diartikan sebagai 'tempat pendidikan manusia baik-baik'. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan seseorang atau beberapa santri belajar kepada pemimpin pesantren (kyai) dibantu oleh beberapa guru (ulama atau ustadz). Di dalamnya terdapat lima elemen dasar yang tidak terpisahkan; pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab kuning, santri, dan kyai. Inilah yang disebut tradisi pesantren.

Pesantren bukanlah semata-mata budaya Islam, karena ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam kemudian berusaha mengadopsi lembaga pendidikan pada masa Hindu-Budha yang membentuk pendidikan asrama lalu mengislamkannya. Di masa sekarang pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat mendidik para santri, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bergerak di luar pesantren, yaitu di kalangan masyarakat di sekitar pesantren. Selain itu, unsur pendidikan modern telah masuk ke dalam pesantren, sehingga ada pula yang bersifat modern seperti pesantren Gontor, Ponorogo.

Kitab-kitab kuning yang dianut oleh pesantren berasal dari ulama salaf, sedangkan dalam bidang skidah mengikuti mazhab Sunni, dengan Asy'ariah dan Maturidiyah. Dalam menghadapi masalah sosial, kaum pesantren akan lebih mudah berkompromi daripada menbang secara mutlak. Karena perbedaan pendapat sering muncul diantara para kyai, maka mereka memutuskan untuk menghindari polarisasi dengan memunculkan pendapat ketiga. Namun, dalam

masalah kekuasaan, polarisasi diperkenankan karena termasuk di dalam masalah *far iyyah*. Namun demikian masih juga terdapat perbedaan pendapat diantara kyai terbukti dengan adanya kyai yang terjun ke dalam kegiatan politik praktis seperti para kyai yang terjun di dalam NU namun ada pula yang tidak.

3.2 Fundamentalisme Islam dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Islam di Indonesia

Di dalam bagian ini kita tidak dapat mengabaikan pemahaman mengenai Fundamentalisme Islam yang memiliki pengaruh yang cukup penting di dalam memahami tumbuhnya sentimen anti-Barat dan anti-Amerika Serikat. Hal pertama yang harus kita pahami yaitu mengenai konsep dasar Fundamentalisme Islam dan selanjutnya digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai pengaruhnya terhadap gerakan Islam di Indonesia.

3.2.1 Konsep Dasar Fundamentalisme Islam

Fundamentalisme Islam merupakan isu yang penting di dalam kancah politik internasional dua dekade terakhir, disamping masalah hak asasi manusia dan demokratisasi. Definisi istilah fundamentalisme Islam terutama dirumuskan oleh para ilmuwan barat untuk menyebut gerakan keagamaan Kristen yang bertujuan untuk kembali kepada ajaran agama yang asli, rigid dan literalis. Istilah ini kemudian dipergunakan secara sepihak untuk menyebut gerakan serupa di dunia Islam yang juga bertujuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Teoritisi seperti John L. Esposito mengartikan gerakan fundamentalisme Islam sebagai gerakan Islam politik, sedangkan

Oliver Roy mengatakan bahwa 'Islam politik sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama sekaligus sebagai ideologi politik. Ia lebih menekankan pada gerakan 'neofundamentalisme' yang antara lain menuntut pemberlakuan syariat Islam.⁴⁰ Musa Keilani mengatakan bahwa fundamentalisme Islam adalah gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif (dengan doktrin agama) kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan kepribadiannya sendiri.⁴¹ Namun sayang gerakan fundamentalisme Islam oleh sebagian besar masyarakat dunia khususnya masyarakat Barat dinilai dengan sinis dan pesimis, karena menurut mereka gerakan tersebut terlalu rendah, hina, serta sering memakai cara-cara kekerasan.

Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu memahami jihad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan fundamentalisme Islam. Kata 'jihad' berasal dari kata 'jahada' yang berarti 'berusaha' (menyebarkan Islam). Di Barat, istilah ini dipahami sebagai perang suci (*the holy war*) terutama perang antara negara muslim dan negara non muslim dalam rangka penyebaran agama Islam atau mempertahankan diri dari serangan negara lain atau pengaruh-pengaruh asing.

⁴⁰ Pendapat kedua tokoh ini dikutip dari Riza Sihbudi, dalam *Indonesia dan Dinamika Islam Politik*, PPW LIPI 2000, hal 29

⁴¹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Paramadina Jakarta, 1999, hal 16-17

Pada masa awal perkembangan Islam di Mekah (610-622 M) jihad dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam sebagai agama baru dan melawan orang-orang yang tak beriman di Mekah yang menolak dan mengejar orang-orang muslim pimpinan Muhammad, sampai Muhammad dan pengikutnya terdesak ke Madinah. Setelah kemenangan Muhammad dalam perang Badar lalu kembali ke Mekah, istilah Jihad diletakkan pada arti perang suci melawan orang-orang tak beriman secara umum, tidak hanya orang-orang yang tak beriman di jaman Muhammad saja.⁴²

Semenjak abad ke-18, banyak gerakan di negara Islam yang memakai konsep jihad untuk menghadapi kolonialisme dan imperialisme Barat di negeri mereka. Gerakan Islam yang paling dikenal disini adalah *Moslem brotherhood* atau Persaudaraan Muslim di Mesir, disamping gerakan Hamas di Palestina, FIS di Aljazair, dan Partai Refah di Turki.

3.2.2 Pengaruh Gerakan Fundamentalisme Islam terhadap Gerakan Islam di Indonesia

Kebangkitan Islam atau Revivalisme Islam mulai melanda dunia pada dekade 1970-an sampai dengan 1980-an. Pada masa ini hampir secara serentak terjadi kebangkitan Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam khususnya di kawasan timur Tengah. Pengaruh tersebut kemudian menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia.

⁴² David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973-1993*, Frank Cass, London, 1995, hal 126

Proses Islamisasi dan revivalisme Islam di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung menempuh jalan damai melalui saluran konstitusi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam proses revivalisme Islam di Indonesia yang pertama kali dilakukan ialah cita-cita untuk kembali kepada kemurnian al-Quran dan al-hadist serta mengikis unsur-unsur non Islami dari agama dan budaya. Sikap ini terutama tampak dari gerakan Muhammadiyah. Sejak 1980, terdapat ide alternatif yang disadur dari pemikiran Fazlur Rahman dan iklim intelektual anggota-anggota muda NU. Mereka mengutamakan untuk mempelajari Islam sebagai tradisi yang hidup.

Strategi yang ditempuh kaum revivalisme Islam juga mengalami dinamika. Jika pada masa Orde Lama mereka menunjukkan partisipasi dan mobilitas yang bersifat primordial berdasarkan solidaritas emosional. Maka pada masa Orde Baru hal ini berubah menuju sifat rasional-fungsional, berdasarkan hubungan kepentingan. Hubungan kepentingan itu ditunjukkan dengan masuknya elit santri dalam birokrasi baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai anggota legislatif yang mewakili Golkar, atau bahkan PPP dan PDI.

Walaupun pada kedua Orde tersebut gerakan Islam dianggap gagal mewakili aspirasi umat, namun pada masa reformasi gerakan Islam menemukan momen yang penting dimana kebebasan politik dapat diperoleh semua warga masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan terpilihnya

Abdurrahman Wahid sebagai presiden daapt dikatakan sebagai kemenangan umat Islam di Indonesia. Namun sayang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia belum dapat dilakukan karena masalah Konstitusi dan banyaknya kelompok-kelompok non Islami yang menentang.

Oleh karena itu, pada masa ini kemudian muncullah kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada gerakan fundamentalisme Islam, dengan perjuangan antara lain yaitu untuk pemberlakuan syariat Islam, menolak segala bentuk campur tangan Barat dan terutama Amerika Serikat, serta untuk membebaskan kaum Islam dari penindasan kelompok dan bangsa lain. Kelompok-kelompok yang muncul pada masa ini antara lain yaitu :

- 1. Front Pembela Islam (FPI)**

FPI berdiri pada 1998 dengan dimotori oleh K.H. Habib Rizieq, seorang tokoh Islam yang cukup vokal terhadap pemerintah. Ia kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah khususnya mengenai 'ketakutan' pemerintah terhadap Amerika Serikat terutama mengenai perang terhadap terorisme. Ia mengatakan, dengan dukungan pemerintah terhadap serangan AS ke Afghanistan, maka pemerintah telah melanggar UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Habib Rizieq, FPI telah menjadi militan dan gigih memperjuangkan nasib sesama muslim, salah satunya dengan membuka pendaftaran jihad ke Afghanistan disaat serangan AS ke Afghanistan meletus pada 2001. Namun, kegiatan ini kemudian dilarang oleh pemerintah.

2. Laskar Jihad

Laskar Jihad merupakan organisasi massa Islam yang berdiri pada 1999 yang didirikan oleh Ja'far Umar Thalib, seorang mantan Mujahid perang Afghanistan tahun 1987-1989. Ia juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKAWJ). Pendirian Laskar Jihad dimaksudkan untuk membantu penyelesaian kemelut bangsa terutama menjelang Pemilu 1999. Disamping itu, kiprah Laskar Jihad juga diakui dalam membantu perjuangan kaum muslim di Maluku dalam menghadapi pertentangan dengan kaum Kristen. Laskar Jihad juga bersuara keras menentang seorang presiden perempuan.

3. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

MMI dimotori oleh K.H. Abu Bakar Ba'asyir yang juga merupakan seorang veteran perang Afghanistan semasa perang Afghanistan-Uni Sovyet meletus. MMI dinilai sebagai organisasi Islam yang paling anti-AS jika dibandingkan dengan kelompok Islam lainnya. Hal ini tidak lepas dari figur Ba'asyir yang dinilai amat militan, dan mempunyai hubungan dengan Jamaah Islamiyah Asia Tenggara, yang dinilai sebagai teroris di kawasan ini disamping Abu Sayyaf. Menanggapi tuduhan itu kubu MMI yang identik dengan pondok pesantren di Ngruki, Solo mengatakan bahwa mereka hanya berusaha menegakkan Syariat Islam di bumi Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN



Tindakan AS dalam memerangi kelompok fundamentalisme Islam yang berkembang di seluruh dunia telah menemukan babak baru, yaitu yang dikemas dalam istilah terorisme. Serangan teroris 11 September 2001 merupakan 'biang keladi' dari lahirnya serangkaian kebijakan luar negeri AS yang semakin mendiskreditkan umat Islam hanya karena Osama Bin Laden, tersangka teroris yang belum terbukti kebenarannya berasal dari kelompok Islam militan yang kerap menentang kebijakan AS.

Hal ini merupakan indikasi bahwa semenjak berakhirnya Perang Dingin serta runtuhnya Uni sovyet dan Komunisme, AS sibuk mencari 'musuh' baru, sehingga ia akan dapat membuktikan kekuatannya kepada seluruh dunia, dan dengan demikian akan dengan mudah berkuasa di segala bidang. AS menemukan bahwa gerakan Fundamentalisme Islam pantas untuk dijadikan musuhnya yang baru, dan diperlakukan sama seperti halnya musuh-musuhnya yang terdahulu. Tampaknya prediksi Huntington mengenai akan terjadinya 'The Clash of Civilization' antara peradaban Barat dan Islam telah terbukti.

Negara seperti Indonesia yang belum mampu 'berdiri di kaki sendiri' berpotensi untuk dimanfaatkan oleh AS demi mencapai tujuannya. Padahal dalam perang melawan terorisme Indonesia harus berubah menjadi seorang intelektual yang tajam menganalisa definisi terorisme, sasaran perang terhadap terorisme, serta maksud apa

sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Memang terkadang Indonesia harus mengorbankan banyak hal untuk 'tidak selalu mengikuti' kehendak AS, akan tetapi seharusnya 'harga diri' harus lebih dikedepankan agar di masa mendatang Indonesia tidak dianggap remeh oleh bangsa lain. Hal ini dirasa penting di dalam proses pembentukan *nation building* agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat baik secara fisik maupun mental.

Umat Islam di Indonesia memang mayoritas. Namun, kata mayoritas tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur kualitas keislaman mereka seperti pada umumnya di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan, bisa dikatakan, justru mereka yang benar-benar menjalankan syariat Islam adalah mereka yang berjumlah minoritas, sehingga gerakan-gerakan Islam yang anti-Barat maupun anti-AS juga bisa dikatakan datang dari kelompok Islam minoritas tersebut. Hal ini disebabkan bahwa keyakinan mereka bersifat fundamental dalam agama Islam. Namun begitu, gerakan anti-AS di Indonesia yang saat ini didominasi oleh kelompok-kelompok Islam, seharusnya dipandang sebagai suatu gejala alami dari sebuah negara berpenduduk mayoritas muslim, apalagi jika mereka menentang sesuatu yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang juga akan mengancam umat Islam sendiri. Gerakan tersebut tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang mengancam hanya karena tidak disukai atau dikehendaki oleh AS, negara yang saat ini paling berkuasa di dunia. Pemerintah harus melihat hal ini secara obyektif, dimana umat Islam berhak menyuarakan aspirasinya, dan berani menentang AS jika tidak sependapat dengannya.

Lebih daripada itu, pemerintah harus mengikutsertakan umat Islam dalam pertimbangan-pertimbangan utama kebijakan luar negeri, dikarenakan mereka merupakan penduduk mayoritas jika dibandingkan dengan golongan lain. Hal ini menjadi lebih penting untuk melindungi kaum Islam di saat sekarang dimana umat Islam sedang terdesak ke dalam lubang 'terorisme' yang sedang dibuat oleh AS. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akibat yang semakin buruk juga akan menimpa Indonesia di dalam negeri, karena ketidakadilan akan selalu berakibat negatif.

Oleh karena itu, perlu kiranya bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan konkrit dalam menghadapi masalah ini, salah satunya yaitu perlunya pemerintah memberanikan diri menolak suatu kebijakan luarnegeri AS yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah harus berani membela kepentingan bangsa dan negara, dan tidak lagi merasa was-was serta terancam oleh sikap *paranoid* AS terutama dalam mendiskreditkan umat Islam di Indonesia.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tumbuhnya sentimen anti-Amerika Serikat di Indonesia tidak akan berpengaruh dan berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara, selama pemerintah Indonesia berani melakukan tindakan tegas dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh rasa takut terhadap negara superpower di dunia. Hal ini juga akan diperkuat pula dengan keyakinan bahwa setiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang sama dan saling membutuhkan satu sama lain tanpa memandang suku, ras, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karya Tulis

- **Allison, GT.**, *Esence of Decition, Explaining the Cuban Missile Crisis*, Little Brown and Company, Boston, 1971
- **Bandoro, Bantarto**, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama orde Baru*, CSIS, Jakarta, 1996
- **Bashori, Dimyathi, A.** (ed), *Osama bin Laden Melawan Amerika*, Mizan, Bandung, 2000
- **Departemen Agama RI**, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1995
- **Leifer, Michael**, *Politik Luar Negeri Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986
- **LIPI**, *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat di masa Pemerintahan Presiden Clinton*, PPW LIPI, 2000
- **LIPI**, *Indonesia dan Dinamika Islam politik*, PPW LIPI, 2000
- **Mahendra, Yusril, I.**, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Paramadina, Jakarta, 1999
- **Mc Clelland, Charles, A.**, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Jakarta, 1981
- **Sevilla, Conzuelo, G. dkk**, *Pengantar Metode Pnelitian*, UI Press, Jakarta 1993

- **Thaba, Abdul, A.**, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996
- **The Liang Gie**, *Ilmu Politik, Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologis*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1987

B. Jurnal

- *Contemporary International Relations*, China Institute of International International Relations, Vol 12, No 2, February 2002
- *The International Quarterly*, Vol XXIX, Fourth Quarter, 2001

C. Surat Kabar/ Majalah

- Forum Keadilan, 21 Oktober 2001
- Forum Keadilan, 19 Mei 2002
- Jawa Pos, 3 Agustus 2002
- Kompas, 16 September 2001
- Panji, 11 Oktober 2001
- Panji, 17 Oktober 2001
- Tempo, 14 April 2002

